



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BeLaGak

BALAI BESAR POM DI PALEMBANG



BeSoLek

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN III TAHUN 2022	xii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang	1
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang	4
1.4 Isu Strategis: Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2022-2024	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	62
2.3 Perjanjian TRIWULAN III TAHUN 2022	62
2.4 Rencana Aksi Perjanjian TRIWULAN III Tahun 2022	65
2.5 Metode Pengukuran	65
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	67
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	67
3.2 REALISASI ANGGARAN	118
BAB IV. PENUTUP	121

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 RENSTRA BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2022-2024**
- LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 5 CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 TW3**
- LAMPIRAN 6 CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN III TAHUN 2022**
- LAMPIRAN 7 REWARD/PUNISHMENT MONEV IKK TW 3 TAHUN 2022**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cathment Area Balai Besar POM di Palembang	4
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022	15
Tabel 3	Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2022	63
Tabel 4	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	66
Tabel 5	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW 3 Tahun 2022	67
Tabel 6	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama TW 3 Tahun 2022	69
Tabel 7	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW 3 Tahun 2022	73
Tabel 8	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW 3 Tahun 2022	75
Tabel 9	Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW 3 Tahun 2022	76
Tabel 10	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW 3 Tahun 2022	78
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat TW 3 Tahun 2022	80
Tabel 12	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu TW 3 Tahun 2022	82
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan TW 3 Tahun 2022	83
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan TW 3 Tahun 2022	83
Tabel 15	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW 3 Tahun 2022	84
Tabel 16	Capaian indikator Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan TW 3 Tahun 2022	85

Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TW 3 Tahun 2022	87
Tabel 18	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu TW 3 Tahun 2022	89
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan TW 3 Tahun 2022	91
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan TW 3 Tahun 2022	93
Tabel 21	Capaian indikator Indeks Pelayanan Publik TW 3 Tahun 2022	95
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT TW 3 Tahun 2022	95
Tabel 23	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW 3 Tahun 2022	97
Tabel 24	Capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman TW 3 Tahun 2022	99
Tabel 25	Capaian indikator kinerja Jumlah desa pangan aman TW 3 Tahun 2022	101
Tabel 26	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya TW 3 Tahun 2022	103
Tabel 27	Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TW 3 Tahun 2022	105
Tabel 28	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TW 3 Tahun 2022	107
Tabel 29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII TW 3 Tahun 2022	108
Tabel 30	Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW 3 Tahun 2022	111
Tabel 31	Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW 3 Tahun 2022	112
Tabel 32	Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW 3 Tahun 2022	112
Tabel 33	Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW 3 Tahun 2022	113
Tabel 34	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas	116

Obat dan Makanan di Palembang TW 3 Tahun 2022

Tabel 35	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja TW 3 Tahun 2022	118
Tabel 36	Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan TW 3 Tahun 2022	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BBPOM di Palembang	4
----------	--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.7.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan TW 3 Tahun 2022 terhadap Tahun 2022	109
----------------	--	-----

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) Interim Triwulan III tahun 2022 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Palembang kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai **Unit Pelaksana Teknis** BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2022 merupakan laporan kinerja Balai Besar POM di Palembang dari Juli 2022 sampai dengan September 2022 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Balai Besar POM di Palembang sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama di Triwulan III Tahun 2022 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai, khususnya penguatan laboratorium dan teknologi informasi.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi BBPOM di Palembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Palembang, 17 Oktober 2022
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan di Palembang



Drs. Zulkifli, Apt

RINGKASAN
EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang TW 3 Tahun 2022 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan sampai dengan TW 3 tahun 2022. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada TW 3 tahun 2022 yang telah dituangkan target pertriwulan /bulanan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024.

Selama 3(tiga) bulan kegiatan pada TW3 tahun 2022, Balai Besar POM di Palembang harus mencapai 11 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pada TW3 Tahun 2022 dari 11 Sasaran Kegiatan hanya 7(tujuh) sasaran kegiatan yang dapat dihitung dengan 2(dua) sasaran kegiatan dengan kriteria capaian Memenuhi Ekspektasi, 3(tiga) kegiatan dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dan 2(dua) sasaran kegiatan kriteria capaiannya Tidak Dapat Disimpulkan.
- 2) Dari 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang dicapai tersebut dari beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama mencapai kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (100,56%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** dan 4(empat) indikator dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.
 - b. Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi” (95,58%)** dengan 1 indikator dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”** , 2 indikator dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**, 1(satu) indikator dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** dan 2(satu) indicator dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi”**.

- c. Sasaran Kegiatan Kelima dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"** (98,03%) dengan 1(SATU) indikator dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan", 1(SATU) indikator dengan kriteria "Tidak Memenuhi Ekspektasi", dan 2(Dua) Indikator dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi".
 - d. Sasaran Kegiatan keenam dengan kriteria **"TIDAK DAPAT DISIMPULKAN"**(122,85%) yang terdiri dari 2(dua) indikator dengan kriteria "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN".
 - e. Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi"**(91,95%) yang terdiri dari 1 Indikator kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi".
 - f. Sasaran Kegiatan kesepuluh dengan **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN"**(138,10%) yang terdiri dari 1(SATU) indikator dengan kriteria "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN".
 - g. Sasaran Kegiatan kesebelas dengan kriteria **"Memenuhi Ekspektasi"**(111,06%) yang terdiri dari 1(SATU) indikator dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".
- 3) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan di TW 3 sebesar 72,32% (Rp. 22.761.223.699) dari Rp.31.471.608.000 Anggaran Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 31,60% sampai dengan 92,37%.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Triwulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada TW 3 tahun 2022.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.

- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai

HIGHLIGHT TW III JULI sd SEPTEMBER TAHUN 2022

1. Sriwijaya Expo 2022

Sriwijaya Expo yang berlangsung dari tanggal 2-6 Juli 2022 di Gelora Sriwijaya Palembang agaknya menjadi ajang bagi start up UMKM untuk mempromosikan produknya ke masyarakat luas. Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang kaya akan sumber daya alam menjadi modal positif bagi para entrepreneur untuk berkarya dan berinovasi menciptakan produk lokal spesifik unggulan yang bisa menjadi daya tarik sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. BBPOM di Palembang selain berpartisipasi meramaikan stand pameran juga turun langsung menjaring UMKM yang sudah selangkah naik kelas dari PIRT menjadi MD melalui program PEMPPEK (Pendampingan dalam pEMenuhan Persyaratan Perijinan produk. Pelaku usaha diberikan bimbingan dan pengetahuan terkait tatacara pendaftaran produk di Badan POM. Program PEMPPEK ini diharapkan mampu menjaring sebanyak-banyaknya UMKM baik pangan, obat tradisional dan kosmetik sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menggerakkan roda perekonomian bangsa.



2. Peran Serta Balai Besar POM di Palembang dalam FORNAS ke VI Tahun 2022

Provinsi Sumatera Selatan dipercaya menjadi tuan rumah dalam acara olahraga tingkat nasional yaitu Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) ke VI Tahun 2022. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 1-7 Juli 2022 dan diikuti oleh 55 induk olahraga rekreasi dan 10 eksibisi. Balai Besar POM di Palembang turut berpartisipasi sebagai Tim Keamanan Pangan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 1 Juli 2022, Tim Keamanan Pangan melakukan pengujian makanan untuk Opening Ceremony yang dilaksanakan di Rowing and Canoeing Regatta Course Jakabaring Sport City Palembang yang dihadiri oleh Menpora Zainudin Amali. Dari 24 sampel yang diuji, diperoleh hasil memenuhi syarat. Selama kegiatan FORNAS VI berlangsung, Tim Keamanan Pangan melakukan pengawasan sarana produksi dan pengujian makanan dari Catering penyedia makanan untuk peserta dan official, serta melakukan pembinaan dan edukasi kepada pedagang gerai makanan yang berada di area (venue) pelaksanaan FORNAS baik di kota Palembang maupun di Kabupaten Ogan Ilir (Tanjung Senai). Balai Besar POM di Palembang berkomitmen untuk memastikan keamanan pangan selama FORNAS VI untuk mendukung kelancaran kegiatan yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.



3. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior oleh Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP) Badan POM di BBPOM Palembang

Sertifikasi ini bertujuan untuk mewujudkan SDM Keamanan Pangan yang berkualitas dan berdaya saing. Peserta sertifikasi terdiri dari pegawai Balai Besar POM di Palembang, pegawai Loka POM di Lubuklinggau dan pegawai Dinas Kesehatan dari 15 Kabupaten se-Provinsi Sumatera Selatan. Peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi LSP BPOM merupakan peserta yang lulus pelatihan keamanan pangan (PKP Pertama/ Junior DFI) tahun 2021. Proses sertifikasi kompetensi diawali dengan melakukan pengisian APL 02 secara bersama-sama yang dipandu oleh tim dari PPSDM selaku LSP Badan POM. Bagi peserta sertifikasi DFI selanjutnya menyaksikan video Desktop Inspection terkait temuan-temuan pada sarana, sedangkan bagi peserta PKP dilanjutkan dengan proses pra asesmen dengan memanggil seluruh peserta di skema yang sama. Pelaksanaan sertifikasi dilanjutkan dengan wawancara portofolio dokumen APL 02 yang sebelumnya telah diupload sebelumnya dan praktik demonstrasi bagi peserta Penyuluh Keamanan Pangan Pertama. Proses wawancara terhadap 13 peserta PKP dilakukan oleh 3 assesor PKP dan 16 peserta Junior DFI yang dilakukan 3 assesor DFI. Peserta sertifikasi kompetensi yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat kompetensi nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi tenaga keamanan pangan oleh LSP Badan POM tahun 2023 akan tetap dibuka secara umum dan dapat diikuti oleh seluruh tenaga keamanan pangan dengan tata cara dan jadwal yang akan diberitahukan kemudian. Tempat Uji Kompetensi (TUK) BBPOM di Palembang berkomitmen mendukung penuh rangkaian kegiatan sertifikasi profesi secara terbuka dan transparan.



4. Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban Di Badan POM di BBPOM Palembang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam memperingati Hari Idul Adha 1443 H telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022. Bertempat di halaman parkir Balai Besar POM di Palembang dilakukan penyembelihan 3(tiga) ekor sapi yang dilakukan oleh panitia kurban Balai Besar POM di Palembang dengan hasil penyembelihan dibagikan kepada warga sekitar dan seluruh pegawai Balai Besar POM di Palembang. Penyembelihan hewan kurban ini bertujuan untuk mewujudkan semangat berbagi dan memupuk rasa empati pegawai Balai Besar Palembang untuk menyisihkan sedikit penghasilannya perbulan untuk dapat dibelikan hewan kurban pada setiap peringatan Hari Idul Adha di Lingkungan Balai Besar POM di Palembang.



5. **Pelaksanaan *General Medical Check Up* Bagi Seluruh Pegawai Balai Besar POM di Palembang**

Sebagai bentuk kepedulian serta pemenuhan hak kesehatan terhadap pegawai, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang kembali melakukan *General Medical Check Up* untuk seluruh pegawai yang dilaksanakan di Aula Balai Besar POM di Palembang. Pada tahun ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang bersinergi dengan Klinik Prodia Palembang. Ada beberapa pos pemeriksaan mulai dari treadmill, pemeriksaan menggunakan USG, tes darah, tes fisik, tes EKG hingga tes urine. Kegiatan berlangsung selama dua hari dimulai Selasa, 12 Juli 2022 hingga Rabu, 13 Juli 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan pegawai untuk menghindari penyakit yang terlambat penanganannya serta diharapkan agar pegawai bisa menjaga kesehatan guna tetap bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



6. **BBPOM di Palembang bersama Kedepatian IV dan Komisi IX DPR RI Kembali Edukasi Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)**

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Kedepatian IV dan BBPOM di Palembang menggandeng Anggota DPR RI Komisi IX, Irma Suryani, S.E untuk menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kabupaten OKUS (18/7) dan Kabupaten OKUT (19/7) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta dari masyarakat sekitar. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Acara KIE Obat dan Makanan ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Kiwis Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Bapak Sartono (18/07) dan sambutan oleh Bapak Ngadiman selaku Kepala Desa Warna Jaya Kecamatan Semendawai Timur, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Perwakilan Balai Besar POM di Palembang, Muhammad Asrul, M.Kes., Apt. tentang Bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih Obat dan Makanan yang Aman dan Materi dari Koordinator Kedepatian IV, Loise Riani Sirait yang menyampaikan Tugas dan Fungsi Badan POM serta memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan obat dikalangan anak muda. Selanjutnya Ibu Irma Suryani, S.E menegaskan atas paparan dari pemateri sebelumnya.

Kegiatan ini diikuti dengan sangat antusias oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Pada akhir acara Ibu Irma Suryani, SE selaku anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan kepada konstituennya bahwa Badan POM merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam pembangunan kesehatan masyarakat khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Anggota DPR RI menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan produk yang dibeli dengan Cek KLIK (cek Kemasan; cek Label; cek Izin edar dan cek Kadaluarsa) dan ada Kepala BBPOM di Palembang menambahkan kepada peserta KIE agar

dapat menyampaikan informasi ini kepada tetangga dan keluarga agar terlindung dari penggunaan produk yang tidak aman. dan selalu ingat CEK KLIK.



7. BBPOM di Palembang bersama Komisi IX DPR RI Kembali Edukasi Masyarakat di Kabupaten Lahat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Kedeputian IV dan BBPOM di Palembang menggandeng Anggota DPR RI Komisi IX, Ir. Sri Meliyana untuk menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Desa Sukajadi (18/7) dan Desa Pagarjati (19/7) Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta dari masyarakat sekitar. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ir. Sri Meliyana selaku anggota Komisi IX DPR RI memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Pada sambutannya Ir. Sri Meliyana menyampaikan bahwa Badan POM merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam pembangunan kesehatan masyarakat khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt tentang KIE Peduli Obat, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Aman. Materi diberikan secara menarik dengan menggunakan contoh produk obat tradisional dan kosmetik yang ilegal/tanpa izin edar serta mengandung Bahan Berbahaya. Dimana dari hasil Pengawasan Balai Besar POM di Palembang masih ditemukan Obat Tradisional/Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti Jamu Pegal Linu yang berupa cairan dan jamu kuat begitu juga pada Kosmetik Pemutih yang mengandung Merkuri



8. **Asistensi Penyusunan Perencanaan Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan di UPT BPOM Regional Sumatera**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang telah menjadi tuan rumah pada asistensi perencanaan dan monev kegiatan dan laporan keuangan UPT BPOM regional Sumatera yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM pada tanggal 19 dan 20 Juli 2022. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Besar POM di Palembang, dan dihadiri oleh 24 orang yang merupakan perwakilan dari 6 Balai Besar, 4 Balai, dan 14 loka yang termasuk dalam regional Sumatera. Asistensi ini bertujuan mengawal setiap penanggungjawab di UPT BPOM Regional Sumatera untuk menyusun perencanaan penganggaran, monev pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Kegiatan berlangsung dengan lancar, di hari pertama (19/7) dilaksanakan paparan tentang siklus dan proses penganggaran, penyusunan rencana kerja dan penetapan penganggaran, serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Interaksi antara peserta dan narasumber sangat baik, dimana peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi diskusi. Kegiatan selanjutnya pada hari Rabu, 20 Juli 2022 adalah desk bersama tim dari biro perencanaan dan keuangan. Peserta diperbolehkan menyampaikan keluhan ataupun kesulitan dalam melakukan pengisian data manual ataupun melalui aplikasi yang diperlukan. Dengan adanya desk ini, diharapkan setiap peserta mendapatkan saran serta solusi agar tidak mengalami kesulitan yang sama pada periode selanjutnya.



9. **BBPOM di Palembang Bersama Komisi IX DPR RI Mengedukasi Masyarakat di Kabupaten Lahat**

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. BBPOM di Palembang bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Ir. Sri Meliyana menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Desa Sukamerindu, Kabupaten Lahat (24/7) dan Desa Genting, Kabupaten Lahat (25/7) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi

diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya. Pada hari pertama (24/7), Ir. Sri Meliyana selaku anggota Komisi IX DPR RI memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Pada sambutannya Ir. Sri Meliyana menyampaikan bahwa Badan POM merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam pembangunan kesehatan masyarakat khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Koordinator Substansi Infokom, Gustini, SKM tentang KIE Peduli Obat, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Aman. Pada hari Kedua (25/7), Ir. Sri Meliyana selaku anggota Komisi IX DPR RI memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Pada sambutannya Ir. Sri Meliyana menyampaikan bahwa masyarakat harus mengerti cara untuk membeli makanan maupun obat secara baik dan benar, maka dari itu Beliau menyampaikan bahwasanya masyarakat harus mengerti pedoman dari BPOM yaitu Cek KLIK. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt tentang KIE Peduli Obat, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Aman.



10. BBPOM di Palembang bersama Kedepuitan IV Badan POM dan Komisi IX DPR RI Kembali Edukasi Masyarakat di Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Kedepuitan IV dan BBPOM di Palembang bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Irma Suryani, S.E untuk menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kota Prabumulih (24/7) dan Kabupaten Ogan Ilir (25/7) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya.

Pada hari pertama (24/7), acara KIE Obat dan Makanan dibuka dengan sambutan dari perangkat desa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait cara menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih Obat dan Makanan yang Baik dan Aman oleh Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Bpk. Rizkal S.Sos., M.M. dan dilanjutkan langsung oleh Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang terkait pentingnya menjadi konsumen yang waspada terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga dapat melindungi diri

sendiri serta keluarganya. Pada hari Kedua (25/7), acara KIE Obat dan Makanan dibuka dengan sambutan dari kepala desa setempat. Edukasi terkait keamanan obat dan makanan disampaikan oleh Bpk. Robby Nuzly, SF., Apt. selaku koordinator substansi intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Kemudian dilanjutkan edukasi oleh perwakilan Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Muhammad Asrul, M.Kes., Apt. Kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Ogan Ilir, Bpk. Arif Falefi, SE sebagai perwakilan Ibu Irma Suryani, SE yang sedang berhalangan hadir. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta dari masyarakat Kelurahan Sukajadi, (Kec. Prabumulih Timur) dan Kelurahan Seri Kembang (Kec. Muara Kuang). Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh antusias peserta serta tetap mematuhi protokol kesehatan.



11. *Sharing Knowledge* dan Pendampingan Replikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIPETA)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang berkesempatan mendapatkan *Sharing Knowledge* dan Pendampingan Replikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIPETA) yang diberikan oleh Tim IT Balai Besar POM di Bandung pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Besar POM di Palembang, dan dihadiri oleh Resepsionis, Security, Tim IT dan perwakilan masing-masing substansi BBPOM di Palembang. Kegiatan *Sharing knowledge* berlangsung dengan lancar dan interaksi antara pegawai dan narasumber sangat baik, dimana pegawai dapat langsung mengajukan pertanyaan terkait SIPETA. Setelah acara *sharing knowledge*, selanjutnya Tim IT BBPOM di Bandung melakukan instalasi SIPETA pada mesin Kiosk di ruang pelayanan publik, lalu dilanjutkan dengan uji coba aplikasi oleh pelanggan serta memberikan pendampingan penggunaan SIPETA kepada Resepsionis. SIPETA telah terinstall dengan baik dan untuk siap digunakan. BBPOM melakukan replikasi SIPETA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan komitmen BBPOM di Palembang untuk terus mengabdikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.



12. BPOM Palembang bersama Wakil Wali Kota Palembang sidak Gudang Suplai Mini Market Alfamart.

Rabu (27/7), Balai Besar POM di Palembang bersama Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mendatangi Gudang Suplai Mini Market Alfamart didampingi OPD terkait. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Kota Palembang dari produk Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatan. Dalam sidaknya, Fitrianti Agustinda dan Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang meminta kepada pihak gudang untuk betul-betul selektif dalam mengirim barang ke mini market Alfamart. Dan Tidak menyuplai barang yang kedaluwarsa. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palembang itu telah memberikan peringatan kepada pihak pelaku usaha retail yang terciduk menjual barang kedaluwarsa. Wakil Wali Kota Palembang menegaskan bahwa apabila perusahaan kedapatan menjual barang yang kedaluwarsa aka ada konsekuensinya dari pemerintah dan terdapat peringatan pencabutan izin usaha. Kepala BBPOM Palembang, Drs. Zulkifli Apt. menghimbau kepada masyarakat Palembang agar menerapkan Cek KLIK saat berbelanja, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluwarsa.



13. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dalam rangka pembentukan Kader Keamanan Pangan Desa di Kota Palembang

Pada tanggal 28-29 Juli 2022 , Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dalam rangka pembentukan Kader Keamanan Pangan Desa di Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II yang berlokasi di Kantor Lurah 9 Ilir. Di hari pertama pada tanggal 28 Juli 2022, Ibu Gustini, SKM selaku Koordintor Infokom menyampaikan Pedoman Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dilanjutkan dengan materi Keamanan Pangan yang disampaikan oleh Ibu Adella dari BBPOM Palembang kemudian dilanjutkan materi 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Keluarga yang disampaikan oleh Ibu Karindra dari BBPOM Palembang dan dilanjutkan dengan materi Higiene Sanitasi Makanan yang disampaikan oleh Ibu Mariana Hotlan Malau, SKM dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Pada hari kedua pelatihan pada tanggal 29 Juli 2022, langsung disampaikan beberapa paparan materi yaitu diawali dengan Aplikasi Keamanan Pangan yang disampaikan oleh Ibu Gustini, SKM. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Demo Rapid Test yang dipandu oleh ibu Adella dan ibu Karindra dari Tim BBPOM Palembang.



14. Kunjungan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) DPD Sumatera Selatan ke BBPOM di Palembang

Pada tanggal 03 Agustus 2022, Pengurus IWAPI Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke BBPOM di Palembang. Kunjungan langsung dipimpin oleh Ketua DPD IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Sumatera Selatan Ibu Reni Marsiana beserta tim pengurus lainnya yang disambut oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt di Ruang Rapat Pimpinan. Pada pertemuan tersebut ketua IWAPI Sumatera Selatan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu menindaklanjuti MoU IWAPI Pusat dengan Badan POM, terutama berkaitan dengan Pangan dimana anggota IWAPI juga sudah dilatih sebagai fasilitator Pangan oleh Badan POM, maka pada kesempatan itu Ketua IWAPI berharap kepada Kepala BBPOM di Palembang untuk dapat melakukan bimbingan dan pembinaan kepada anggota IWAPI yang banyak bergerak di bidang makanan terutama tentang Keamanan Pangan dan izin edar, IWAPI mempunyai kepengurusan di 15 kabupaten/kota Sumatera Selatan, dimana sekitar 90% merupakan pengusaha UMKM Mikro sampai Menengah. Pertemuan ini tetap menerapkan protokol kesehatan.



15. Jemput Bola NIE 7 Agustus 2022

Dalam rangka mempercepat terbitnya Nomor Ijin Edar dan sekaligus dalam rangka Pendampingan UMKM, BBPOM Palembang Bersama Tim dari Direktorat Pangan Olahan mengadakan Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan. Acara ini diadakan secara luring dan dihadiri lebih kurang 50 orang pelaku usaha yang sedang berproses dalam mengurus Nomor Ijin Edar (NIE). Acara yang diadakan di Hotel ALTS ini berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 01 Agustus 2022 sampai 02 Agustus 2022. Pada hari pertama diadakan sosialisasi dan pemaparan materi dengan narasumber yang berasal dari Direktorat Pangan Olahan, dari Dinas PTSP dan juga dari BBPOM Palembang sendiri. Pada hari kedua diadakan desk registrasi, dimana para pelaku usaha yang sedang berproses NIE dibantu percepatan proses ijin edarnya satu per satu. Pada hari ini diserahkan juga secara simbolis NIE perusahaan yang keluar. Semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat meningkatkan jumlah ijin edar produk pangan olahan di Sumatera Selatan dan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk pentingnya mengurus NIE



16. Kunjungan Anggota Komisi IX Ke Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Palembang

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong adalah merupakan visi Badan POM. Agar tercapainya visi dari Badan POM ini maka BBPOM di Palembang telah melakukan pengembangan di bidang Pengujian. Selain Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi, BBPOM di Palembang telah mengembangkan pengujian Biologi Molekuler dengan adanya BSL 2. Laboratorium BSL 2 ini telah siap untuk uji PCR Covid-19 dan uji PCR DNA-Porcine. Sejalan dengan itu pada hari Senin, 08 Agustus 2022, Balai Besar POM di Palembang menerima kunjungan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. Sri Meliyana berkesempatan untuk terjun langsung melihat kelengkapan alat- alat laboratorium yang didampingi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Kepala Balai Besar POM di Palembang menyampaikan bahwa pengujian sampel yang diambil dari 17 Kab/Kota, serta sampel dari Loka Lubuk Linggau, karena Loka belum memiliki Laboratorium sendiri untuk menguji sampel. Dalam kesempatan kunjungan Ibu Ir. Sri Meliyana menyampaikan untuk alat-alat Laboratorium yang sudah waktunya diganti atau dari umurnya sudah perlu diganti agar segera diganti, jangan tetap memaksakan menguji dengan alat yang sudah tidak layak untuk beroperasi dalam menguji sampel-sampel. Karena dapat berpengaruh terhadap kevalidan hasil uji sampel tersebut.



17. BBPOM Palembang bersama Anggota Komisi IX melakukan Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah

Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) merupakan pangan jajanan yang ditemukan di lingkungan sekolah dan menjadi konsumsi harian anak sekolah, yang terdiri dari minuman, buah-buahan, cemilan dan makanan sepinggan menjadi santapan anak-anak ketika jam istirahat dan pulang sekolah. Keamanan PJAS ini masih rendah dan masih menjadi permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian dan komitmen komunitas sekolah. Untuk mewujudkan dan menjamin keamanan pangan jajanan di sekolah perlu upaya konkrit dari banyak pihak. Sejalan dengan itu pada hari Senin, 08 Agustus 2022, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah yang bertempat di Kantor Balai Besar POM di Palembang. Peserta bimtek berjumlah 145 orang dari 99 sekolah yang berasal dari 3 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Meningkat Atas. Kegiatan Bimtek ini bertujuan memberikan edukasi dan informasi terkait keamanan pangan di sekolah, memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi. Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. Sri Meliyana berkesempatan membuka acara, dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Palembang berkomitmen penuh untuk mewujudkan pangan aman bagi sekolah di Palembang melalui pembinaan UKS secara masif dan kontinyu. Beliau juga berpesan kepada semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik supaya bisa menerapkan sistem keamanan pangan terhadap kantin sekolah masing masing.

Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt dalam arahan dan sambutannya menegaskan pentingnya dukungan dan tindakan dari banyak pihak meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, pemilik dan pengelola kantin, penjaja/penjual makanan, komite sekolah, orang tua, petugas puskesmas, dan pemerintah daerah. Seluruh pihak ini harus menjalankan perannya masing-masing dan saling mendukung peran satu dengan yang lain dalam menjamin keamanan pangan di sekolah.



18. Tingkatkan Kolaborasi Kendalikan Antimicrobial Resistance

BBPOM di Palembang telah mengadakan pertemuan dengan multisektoral yang bertajuk Workshop Peningkatan *Awareness* dan Pengendalian *Antimicrobial Resistance* pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 yang bertempat di aula lantai I kantor BBPOM Palembang. Acara tersebut dilaksanakan secara *hybrid* dan dihadiri oleh Ketua Komite Farmasi Terapi dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba RSUP Dr. Moh. Husein Palembang, perwakilan dari lintas sektor terkait dan juga dari organisasi profesi seperti dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia sewilayah provinsi Sumatera Selatan. Harapan terbesar dengan adanya kegiatan ini adalah penguatan koordinasi dengan keterbukaan informasi antar Kementerian dan Lembaga, perluasan cakupan kolaborasi pengawasan bersama Kementerian dan Lembaga lainnya, pengoptimalan advokasi dalam meningkatkan keterlibatan organisasi pelaku usaha dan profesi dalam RAN-PRA, sehingga Indonesia dapat menuju generasi sehat dan bangsa berkualitas.



19. BBPOM di Palembang bersama Komisi IX DPR RI memberikan KIE kepada Masyarakat di 3 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

Selama 3 (tiga) hari, dimulai pada tanggal 09 sampai 11 Agustus 2022 Balai Besar POM di Palembang bersama dengan Anggota Komisi IX DPR RI memberikan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada masyarakat di 3 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan dimulai pada tanggal 09 Agustus 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tepatnya di desa Muncak Kabau. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Desa Muncak Kabau, yaitu Bapak Yoni Mardat. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan edukasi oleh anggota Komisi IX DPR RI, Ibu Ir. Sri Meliyana yang menyampaikan pentingnya mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan berkualitas.

Pada hari kedua (10/08), kegiatan KIE dilakukan di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Anggota Komisi IX DPR RI, Ibu Ir. Sri Meliyana membuka acara dan senantiasa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap obat dan makanan yang berbahaya, sehingga masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Kegiatan edukasi selanjutnya disampaikan langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. Dalam kesempatan ini, Kepala BBPOM di Palembang menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan BBPOM di provinsi Sumatera Selatan, seperti terasi yang mengandung rhodamin B, mie dan tahu berformalin, kosmetik ilegal, dan jamu berbaha yang mengandung BKO (bahan kimia obat). Kegiatan selanjutnya dilakukan di Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (11/08). Sebagian besar peserta bertanya terkait obat dan makanan yang berbahaya, bagaimana cara menghindarinya, serta pertanyaan terkait proses registrasi izin edar produk. Kepala BBPOM di Palembang juga menyampaikan terkait berita hoaks dan keabsahan suatu berita obat dan makanan, hanya boleh dipercaya oleh masyarakat jika BPOM yang mengatakannya, yaitu "Kata Siapa?, Kata BPOM". Di akhir kegiatan para narasumber tidak lupa untuk selalu mengingatkan Cek KLIK sebelum mengkonsumsi obat dan makanan, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek waktu Kedaluwarsa. BPOM senantiasa hadir untuk masyarakat memberikan pelayanan prima di bidang pengawasan obat dan makanan. Serta berkomitmen untuk ikut andil mengembangkan UMKM menghasilkan produk yang legal, aman, dan berkualitas.



20. Upacara Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 Di Balai Besar POM di Palembang

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, pada hari Rabu (17 Agustus 2022) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melaksanakan Upacara di halaman Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kegiatan Upacara ini dipimpin langsung oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt sebagai Inspektur Upacara dan diikuti seluruh pegawai di Lingkungan BBPOM di Palembang. Kegiatan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih ini selain Pembacaan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dilakukan pembacaan Teks Proklamasi oleh Inspektur Upacara. Diharapkan dengan diadakannya Upacara ini dapat meningkatkan semangat patriotisme dan sinergisme dalam meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja

BBPOM Palembang sesuai dengan tema peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 **Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat**. Dalam akhir kegiatan upacara, Kepala Balai Besar POM di Palembang menyerahkan Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun bagi PNS BBPOM di Palembang Ibu Lisdamayanti, diharapkan dengan pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya ini dapat memotivasi PNS dalam meningkatkan kinerja dan memberikan keteladanan bagi PNS lainnya.



21. Lomba memperingati HUT RI ke-77 dan Peresmian Pojok Milenial

Pada tahun ini, semarak kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang bertema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” diselenggarakan dengan meriah dan penuh suka cita. Balai Besar POM di Palembang turut memeriahkan peringatan HUT Indonesia ke-77 dengan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu perlombaan. Perlombaan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2022, dengan diikuti oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Palembang. Adapun cabang lomba terdiri dari Lomba Estafet, Lomba Rangking 1, Lomba Tebak-tebakan, Lomba Ambil Koin, Lomba Tenis Meja, Lomba Memasukkan Paku Dalam Botol, Lomba Tebak Gaya. Acara dilanjutkan pada hari Jumat, 19 Agustus 2022, diselenggarakan Puncak Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Rangkaian acara puncak dimulai dengan jalan santai, dilanjutkan dengan Peresmian Pojok Milenial Balai Besar POM di Palembang. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai aktif dan mengundang Pegawai Purnabakti dengan tujuan mempererat silaturahmi. Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Balai dalam sambutannya menyampaikan Pojok Milenial agar digunakan sebagai wadah silaturahmi antar pegawai dan kreasi untuk Agen of Change guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan ditahun-tahun kedepan yang akan semakin sulit.



22. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015

BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Kepala Badan POM menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001: 2015, hal tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.04.21.173 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) BPOM. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar POM di Palembang pada tanggal 22 Agustus 2022 telah melaksanakan Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015, dan yang bertindak sebagai Auditor adalah Ibu Dian Indrawaty, Bapak Stefanus Ponirin, Ibu Vini Virdiana dan Bapak Andi Saputra dari PT. Sucofindo. Kegiatan audit dilakukan dengan metode daring audit jarak jauh /*remote audit* menggunakan ICT (*Information and Communication Technology*) dalam rangka mengantisipasi risiko pandemi Covid-19. *Entry Meeting* dibuka dengan sambutan dari Kepala BBPOM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Adapun cakupan audit meliputi Manajemen Representatif, Substansi Pemeriksaan, Substansi Penindakan, Substansi Pengujian, Substansi Infokom dan Bagian Tata Usaha. Adapun tujuan dari pelaksanaan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu organisasi telah terdokumentasi/terimplementasi/dikelola sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015 dan persyaratan regulasi lainnya yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.



23. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi BBPOM di Palembang kepada Komunitas Masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir

Selama 2 (dua) hari, tepatnya pada tanggal 22-23 Agustus 2022, Balai Besar POM di Palembang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir melakukan kegiatan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada komunitas masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha IRTP, pedagang, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan yang aman. Balai Besar POM di Palembang, diwakili oleh Ibu Gustini, SKM sebagai Koordinator Substansi Infokom memberikan pemaparan terkait obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam peredarannya produk obat dan makanan, masih ditemukan permasalahan seperti pemalsuan produk, produk tie (tanpa izin edar), dan mengandung bahan berbahaya. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan selektif dalam mengonsumsi obat dan makanan. Bahan berbahaya pada pangan yang sering ditemui adalah bahan kimia yang tidak diperbolehkan ada di pangan olahan karena dapat menimbulkan dampak pada kesehatan contohnya formalin, boraks, pewarna tekstil *rhodamin B*, *methanil yellow* dan lainnya. Bahan berbahaya yang ditambahkan pada kosmetik, contohnya logam berat merkuri, asam retinoat dan hidrokuinon yang dapat menyebabkan wajah putih seketika, tetapi menyebabkan efek samping yang fatal. Jamu (obat tradisional) yang berbahaya ialah jamu yang mengandung BKO (bahan kimia obat) dan berisikan bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga dapat merusak kesehatan ginjal.



24. Balai Besar POM di Palembang Bekerja Sama Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir dalam Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Balai Besar POM di Palembang bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir melakukan kegiatan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) kepada para pelaku usaha di Aula Pertemuan LPMP Sumatera Selatan. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt secara langsung memberikan edukasi dan informasi kepada para pelaku usaha tersebut. Pemaparan Beliau terkait peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dipatuhi oleh para pelaku usaha, seperti sanitasi, izin edar, bahan tambahan pangan, dan juga alur SPP-IRT. Untuk bahan tambahan pangan (BTP) yang diperbolehkan, jenis dan kadarnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau juga mengingatkan untuk bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan ada di pangan olahan contohnya formalin, boraks, pewarna tekstil *rhodamin B*, dan *methanil yellow*. Bahan tambahan tersebut merupakan bahan berbahaya yang jika dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan. Alur sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dilakukan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang merupakan sistem daring yang sudah terintegrasi untuk seluruh layanan perizinan dan dinilai berdasarkan pendekatan risiko usaha. Dengan OSS-RBA, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan sertifikat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



25. Audiensi Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan dan PC IAI Kota Palembang serta PC IAI Kabupaten Ogan Ilir ke BBPOM di Palembang

Pada tanggal 24 Agustus 2022, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke BBPOM di Palembang. Kunjungan langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan Bapak Drs.Burhanudin Gumay,Apt.,MM beserta tim pengurus lainnya (Pengurus Cabang IAI Kota Palembang, Pengurus Cabang IAI Kabupaten Ogan Ilir dan

Sekretaris Dewan Pengawas PD IAI Sumsel) yang disambut oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt di Ruang Aula Lantai2. Pada pertemuan tersebut Ketua Dewan Pengawas Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu bersilaturahmi dengan Kepala Balai Besar POM di Palembang terkait telah terbentuknya Pengurusan Cabang beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan membahas peran Ikatan Apoteker Indonesia baik tingkat daerah maupun cabang bersama Balai Besar POM di Palembang dalam program pengawasan Obat dan Makanan. Pertemuan ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya Kepala Balai Besar POM di Palembang sangat menyambut baik maksud dan tujuan PD IAI Sumatera Selatan tersebut dan pada dasarnya beliau sangat care dengan profesi apoteker dimana merupakan profesi yang mempunyai peran penting sebagai mitra Badan POM dalam program pengawasann Obat dan Makanan, Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar Aman, dan lain-lain. Kepala BBPOM di Palembang juga menyampaikan agar profesi apoteker lebih meningkatkan kontribusinya terhadap daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait lainnya.



26. Pemusnahan Produk Hasil Pengawasan Balai Besar Pom Di Palembang Bersama Wakil Walikota Palembang Dan Lintas Sektor Terkait

Pada tanggal 23 Agustus 2022, BBPOM di Palembang melakukan pemusnahan produk hasil pengawasan bersama Wakil Walikota Palembang dan lintas sektor terkait. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk Drs. Zulkifli, Apt bertempat di Pojok Milenial BBPOM di Palembang. Beliau menyampaikan bahwa produk yang dimusnahkan merupakan hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dari bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2022 yang diserahkan oleh pemilik produk kepada petugas Balai Besar POM di Palembang untuk dimusnahkan. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Fitrianti Agustinda, S.H. selaku Wakil Walikota Palembang yang menyampaikan bahwa Beliau bertekad untuk menciptakan kota Palembang yang aman dari obat dan pangan yang berbahaya. Kegiatan juga dihadiri oleh lintas sektor terkait yaitu, Dinas Kesehatan Prov. SumSel, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. SumSel, Ditreskrimsus Polda Sumsel, Dinas di lingkungan Kota Palembang, Ketua YLKI SumSel, Ketua Aprindo, Perwakilan Kepala Pasar, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan pemusnahan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai kinerja dan kapabilitas Badan POM dalam melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan dan merugikan ekonomi nasional. Produk yang dimusnahkan

senilai ratusan juta (Rp 179.837.858) yang terdiri dari produk tie (tanpa izin edar), produk kedaluwarsa, obat tradisional mengandung bko (bahan kimia obat), serta pangan dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Terkait masih adanya peredaran obat dan makanan illegal dan tidak memenuhi syarat, Balai Besar POM di Palembang menegaskan kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih obat dan makanan yang akan digunakan. Jangan membeli atau memilih obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar/nomor notifikasi. Ingat selalu Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar, dan Cek Kedaluwarsa sebelum membeli atau memilih produk obat dan makanan. Hati-hati terhadap berita *hoaks*, yang banyak beredar di media sosial. Jika ada berita terkait obat dan makanan, pastikan sumbernya terpercaya yaitu Badan POM. "Kata siapa? KATA BPOM!".



27. BBPOM di Palembang Memberikan Edukasi kepada Gugus Depan Pramuka SMA N 4 Palembang

Pada 25 Agustus 2022, BBPOM di Palembang menerima kunjungan Pramuka dari SMA N 4 Palembang dengan jumlah peserta 77 orang. Acara dimulai dengan sambutan dari Bpk. Drs. H. Damri, M.M., M.Pd. selaku kepala Sekolah SMA N 4 Palembang. Menurut penuturannya, para siswa dan guru pembina pramuka SMA N 4 Palembang sangat bersemangat untuk mendapatkan edukasi terkait obat dan makanan, sehingga berinisiatif mengunjungi BBPOM di Palembang. Selanjutnya arahan dari Bpk Drs. Zulkifli Apt, Kepala Balai Besar POM di Palembang kepada gugus depan pramuka SMA N 4 Palembang. Beliau berpesan bahwa peran pramuka dalam pengawasan obat dan makanan sangat diperlukan untuk membantu kinerja Badan POM, sehingga cakupan masyarakat yang terlindungi dari obat dan pangan yang berbahaya lebih luas. Acara dilanjutkan dengan pemberian edukasi terkait obat dan makanan oleh Ibu Gustini, SKM selaku Koordinator Substansi Infokom BBPOM di Palembang. Dalam pemaparannya, Badan POM mempunyai sispom yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pramuka SMA N 4 Palembang merupakan bagian dari masyarakat yang harus ikut berperan aktif untuk mengawasi obat dan makanan. Komoditi yang masuk dalam pengawasan BPOM ialah obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam peredaran obat dan kosmetik, sering ditemui pemalsuan produk, produk tie (tanpa izin edar), dan mengandung bahan berbahaya. Selain itu, untuk obat tradisional atau sering disebut jamu, masih ditemukan produk yang mengandung bko (bahan kimia obat). Untuk pangan olahan di Sumatera Selatan, terdapat juga terasi yang

mengandung pewarna tekstil rhodamin B. Dari hasil pengawasan tersebut, diharapkan kita semua dapat lebih waspada dan selektif dalam mengonsumsi obat dan makanan.



28. BBPOM di Palembang Dorong IWAPI SUMSEL Untuk Berinovasi

Selasa 23 Agustus 2022, BBPOM di Palembang hadir pada acara Rakerda II DPD IWAPI Sumatera Selatan yang bertempat di Hotel Aryaduta Palembang. Pada kesempatan ini, Kepala Balai Besar POM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt sebagai narasumber menjelaskan seputar tata cara dalam pengurusan izin produk Pangan, OT dan Kosmetik. Kepala Balai Besar POM di Palembang juga mendukung pengembangan produk UMKM dan mendorong IWAPI untuk berinovasi dalam memunculkan produk selain Pangan, seperti produk UMKM OT dan Kosmetik. Acara yang diikuti oleh pengusaha - pengusaha wanita di Sumatera Selatan ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Staf ahli, Bapak Dr. Ir. Firmansyah. Pada kegiatan ini juga diisi oleh narasumber dari Kemenag, Pegadaian, Kadin dan BSI. Tampak antusias peserta dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Balai Besar POM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt, seputar peran BPOM sebagai pengawas obat dan makanan serta tentang perijinan obat dan makanan. Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin mendorong UMKM berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju dan juga dapat menambah wawasan dan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus NIE. Sehingga Bangsa Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.



29. BBPOM di Palembang bersama Kedepuitan IV dan Komisi IX DPR RI memberikan KIE kepada Masyarakat di Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir

Selama 2 (dua) hari, pada tanggal 27-28 Agustus 2022 Balai Besar POM di Palembang bersama Kedipuitan IV dan Anggota Komisi IX DPR RI memberikan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada masyarakat di Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan diawali (27/08) di Kota Prabumulih, tepatnya di Kelurahan Anak Petai, Kec. Prabumulih Utara. Kegiatan dibuka langsung oleh Lurah Anak Petai, Bpk Tohirin, S.Pd., M.Pd yang sangat menyambut baik kegiatan ini. Pada kesempatan ini, Bpk. Rizkal, S.Sos., M.M. selaku Direktur Intelijen Obat dan Makanan memberikan pemaparan terkait cara menjadi konsumen yang cerdas memilih obat dan makanan yang aman. Kegiatan dilanjutkan oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hasil pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak membeli dan mengonsumsi obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI, Ibu Irma Suryani, SE juga senantiasa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap obat dan makanan yang berbahaya, sehingga masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Pada hari kedua (28/08), kegiatan KIE dilakukan di Desa Limbang Jaya I, Kec. Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Kepala Desa Limbang Jaya I, Ibu Fitri memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Bpk. Rizkal, S.Sos., M.M. memberikan tips untuk memilih obat dan makanan yang aman dengan Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa. Setelah itu, edukasi dilanjutkan oleh Bpk. Drs. Zulkifli, Apt yang menyampaikan komoditi obat dan makanan di Sumatera Selatan yang berbahaya, hasil pengawasan BBPOM. Contohnya terasi yang mengandung rhodamin B, mie dan tahu berformalin, kosmetik ilegal, dan jamu berbahaya yang mengandung BKO (bahan kimia obat).



30. Balai Besar POM di Palembang Ikut Andil dalam Peningkatan Kapasitas SDM Instalasi Farmasi di Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari Kamis, 1 September 2022 Balai Besar POM di Palembang diundang oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pengelolaan Obat dan BMHP sesuai Standar, Pengelolaan Aplikasi E Logistik dan Desk Data RKO 2023. Kegiatan diikuti oleh penanggung jawab instalansi farmasi/gudang farmasi di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Bpk. dr. H. Trisnawarman, M. Kes., Sp.KKLP selaku plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. memberikan pemaparan kepada peserta terkait Cara Distribusi Obat yang Baik di Instalasi Farmasi. Beliau mengingatkan kembali terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban setiap penanggung jawab untuk mengawal mutu obat sampai di sarana pelayanan kefarmasian. Beliau menegaskan kepada para peserta untuk tidak melakukan pelanggaran selama proses distribusi obat, dari mulai pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, sampai pelaporan. Selama pandemi covid-19 yang sudah berlangsung 2 tahun lebih, distribusi yang baik untuk komoditi vaksin corona menjadi hal yang memerlukan perhatian khusus. Peran penanggung jawab gudang farmasi di kabupaten/kota sangat penting untuk menjaga kualitas vaksin tetap baik sampai ke tangan masyarakat.



31. Balai Besar POM di Palembang Kembali Melakukan Sidak di Pasar 10 Ulu Kota Palembang bersama Wakil Walikota Palembang dan Lintas Sektor Terkait

Terasi yang mengandung bahan berbahaya pewarna tekstil Rhodamin B masih ditemukan di Kota Palembang. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan pangan yang berbahaya, BBPOM di Palembang melakukan sidak di Pasar 10 Ulu Palembang pada Jumat, 2 September 2022. Kegiatan dihadiri oleh Ibu Fitrianti Agustinda, SH selaku Wakil Walikota Kota Palembang, beberapa perwakilan dinas di lingkungan Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja serta lintas sektor terkait. Balai Besar POM di Palembang melakukan sampling terhadap pangan olahan di pasar yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, pewarna tekstil rhodamin B, dan metanil yellow. Makanan yang disampling seperti terasi, mie basah, tahu, ikan asin, teri dan cumi asin serta makanan-makanan yang mempunyai warna yang mencolok. Dari hasil pengujian secara cepat dengan test kit oleh petugas di mobil laboratorium keliling BBPOM Palembang terdapat 2 sampel yang TMS (tidak memnuasi syarat) yaitu terasi yang positif mengandung pewarna tekstil rhodamin B dari total 32 sampel. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. beserta tim secara tegas memberikan teguran kepada penjual yang masih berani menjual terasi mengandung rhodamin B. Produk yang ditemukan tersebut kemudian diserahkan oleh penjual kepada petugas BBPOM di Palembang untuk kemudian dilakukan pemusnahan. Bpk. Zulkifli bersama Ibu Fitri senantiasanya mengingatkan kepada para penjual untuk tidak tergiur oleh produsen yang menjual produk terasi dengan warna yang mencolok yang dicurigai mengandung rhodamin B. Pewarna tekstil rhodamin B berbahaya untuk kesehatan tubuh karena dapat menyebabkan penyakit kanker.

Hasil temuan terasi yang mengandung rhodamin B pada saat ini sudah sangat berkurang dari temuan sidak pada bulan Mei 2022. Hal ini dikarenakan BBPOM di Palembang, sebelumnya pada bulan Juni 2022 sudah melakukan pemeriksaan langsung ke tempat pembuatan terasi di Desa Sei Kong, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir yang berjarak 10 jam dari Kota Palembang. Para produsen terasi telah diedukasi oleh petugas untuk tidak menggunakan pewarna tekstil rhodamin B untuk produk terasinya, dan dapat diganti dengan pewarna khusus makanan.



32. Pengajian di Balai Besar POM di Palembang “Hidup Sehat Ala Rasulullah”

Pada hari Rabu, 21 September 2022, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan kegiatan pengajian bersama di aula bersama Ustadz Prof. Dr. dr. H. Yuwono M. Biomed. Kegiatan dibuka oleh Ketua Majelis Ta’lim, Bpk. Muhammad Asrul, S.Si., Apt., M.Kes. Materi yang disampaikan mengenai hidup sehat ala Rosulullah. Dalam tausiahnya Ustadz Prof. Dr. dr. H. Yuwono M. Biomed menyampaikan bahwa bila Kita menginginkan Hasanah (*wellness*), *wellness* artinya derajat kesehatan yang bersifat kontinyu. Orang yang *most wellness* berarti paling sehat. Komponen dari Hasanah : Sehat fisik, Sehat pikiran, akal, Sehat emosional dimana selalu gembira, tidak mudah frustrasi, tidak mudah sedih, tidak perlu ada keributan merupakan emosional yang baik, Sehat pekerjaan: Selama orang masih bisa bekerja, berbisnis, maka itu adalah orang yang bagus kesehatannya dalam hal pekerjaan, Sehat social :bersosialisasi itu tujuannya untuk berkenalan, memperbanyak teman. Hindari ‘suka bawa perasaan’ karena hal tersebut kurang sehat dan yang terakhir adalah Sehat spiritual Tingkatan ini lebih mudah didefinisikan dengan iman. Percaya dengan Agama yang dianut dan seluruh ajarannya. Resep untuk mencapai semua kesehatan itu adalah dengan BERILMU karena segala sesuatu itu ada ilmunya.



33. Kunjungan Edukasi SD Islam Al Alifah di Balai Besar POM di Palembang terkait Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Pada hari Kamis, 22 September 2022 Sekolah Dasar Islam Alifah berkunjung ke Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan kunjungan edukasi. Kegiatan dihadiri oleh 99 peserta murid kelas 5 SD beserta guru wali kelasnya. Kegiatan dibagi menjadi 2 sesi, sesuai jumlah peserta agar proses kegiatan berlangsung kondusif. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt yang sangat menyambut baik kunjungan sekolah ini. Beliau juga mengingatkan kepada siswa-siswi untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan makanan yang sehat dan bergizi. Jajanan itu diperbolehkan, tetapi jangan berlebihan serta jangan lupa untuk tetap makan masakan di rumah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait keamanan pangan jajanan anak sekolah, sehingga mereka dapat terhindar dari pangan yang berbahaya dan tidak layak konsumsi. Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) merupakan pangan jajanan yang ditemukan di lingkungan sekolah dan menjadi konsumsi harian anak sekolah, yang terdiri dari minuman, buah-buahan, cemilan dan makanan sepinggan yang menjadi santapan anak-anak ketika jam istirahat dan pulang sekolah.



34. Balai Besar POM di Palembang mengadakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Pada hari Kamis, 1 September 2022 Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah dalam rangka Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah. Kegiatan diikuti oleh 22 sekolah dari 3 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Peserta berjumlah 44 orang yang merupakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru penanggung jawab kantin, ataupun guru penanggung jawab uks. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi terkait keamanan pangan di sekolah kepada peserta yang akan menjadi kader sekolah. Kader sekolah tersebut akan bertugas meneruskan edukasi kepada komunitas sekolah yaitu siswa-siswi, guru, penjaga kantin, orang tua siswa dan warga lain yang ada di sekolah. Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) merupakan pangan jajanan yang ditemukan di lingkungan sekolah dan menjadi konsumsi harian anak sekolah, yang terdiri dari minuman, buah-buahan, cemilan dan makanan sepinggan menjadi santapan anak-anak ketika jam istirahat dan pulang sekolah. Keamanan PJAS ini masih rendah dan masih menjadi permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian dan komitmen komunitas sekolah. Dalam kegiatan ini turut hadir perwakilan lintas sektor terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Bpk. Syaripudin, S.Pd. merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan kata sambutan kepada para peserta untuk selalu memperhatikan

keamanan pangan jajanan anak sekolah. Selanjutnya pemaparan oleh Bpk. Arpansah, SKM, M.Si., perwakilan Dinas Kesehatan Kota Palembang terkait kebersihan sarana pangan jajanan anak sekolah, dan langsung dilanjutkan oleh Ibu Gustini, SKM yang memberikan materi terkait 5 kunci keamanan dan pengolahan pangan. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan, terlihat saat diskusi berlangsung banyak peserta yang bertanya dan berdiskusi terkait kendala-kendala yang ada di lapangan. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt juga memberikan arahan kepada peserta pelatihan terkait pentingnya dukungan dan tindakan dari banyak pihak baik dari komunitas sekolah itu sendiri seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, maupun lintas sektor seperti pemerintah daerah atau dinas terkait. Seluruh pihak ini harus menjalankan perannya masing-masing dan saling mendukung peran satu dengan yang lain dalam menjamin keamanan pangan jajanan anak di sekolah.



35. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan oleh BBPOM di Palembang bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim

Pada Selasa, 20 September 2022, Balai Besar POM di Palembang bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengadakan kegiatan bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta kader keamanan pangan di Kab. Muara Enim. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih masyarakat yang telah dipilih menjadi kader keamanan pangan. Kader selanjutnya mempunyai tugas untuk meneruskan kie terkait keamanan pangan kepada masyarakat di lingkungannya. Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim dan langsung dilanjutkan sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. Dalam pemaparannya, Beliau menjelaskan terkait peredaran produk makanan berbahaya yang masih ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan. Bahan berbahaya tersebut adalah bahan kimia yang tidak diperbolehkan ada di pangan olahan karena dapat menimbulkan dampak pada kesehatan, contohnya formalin, boraks, pewarna tekstil *rhodamin B*, *methanil yellow* dan lainnya. Kegiatan berjalan lancar dan antusiasme dari peserta, serta tidak lupa tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses kegiatan berlangsung. Selain itu, narasumber juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa sebelum membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Kalau bukan Kata BPOM, jangan pernah percaya dengan berita atau informasi *hoaks* yang banyak beredar di media sosial terkait obat dan makanan. Karena pengawasan obat dan makanan merupakan kewenangan Badan POM.



36. Balai Besar POM di Palembang bersama IAI PD Sumatera Selatan melakukan KIE dalam rangka World Pharmacist Day

Pada hari ini, Minggu 25 September 2022 bertepatan dengan World Pharmacist Day yang merupakan Hari Apoteker Sedunia, BBPOM di Palembang bersama IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) PD Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan KIE bersama di Jakabaring Sport City. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait obat kepada masyarakat. Apoteker adalah profesi kesehatan yang bertanggung jawab terhadap obat dan kualitasnya sampai ke tangan masyarakat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs Zulkifli, Apt. bersama Ketua PD IAI Sumatera Selatan dan PC IAI Palembang. Dalam kegiatan WPD yang bertemakan "Apoteker Bersatu dalam Aksi menuju Dunia yang lebih Sehat" ini, acara dimulai dengan senam sehat bersama yang dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, dan apoteker. BBPOM di Palembang bersama para Apoteker membagikan leaflet dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait obat, cara penggunaannya, penyimpanan sampai cara buang sisa obat dengan benar. Acara berlangsung meriah dan penuh dengan antusiasme masyarakat. BBPOM di Palembang bersama Apoteker dan masyarakat berkomitmen untuk "Menuju Dunia yang Sehat, Obat dan Makanan yang Beredar harus Aman", Kata Siapa? Kata BPOM!



37. SERAH TERIMA SISWA-SISWI PRAKTEK SMK NEGERI 8 PALEMBANG

Balai Besar POM di Palembang kembali menerima 5 siswa-siswi Praktek Kerja Industri (Prakerin) dari jurusan Akuntansi SMK N 8 Palembang. Prakerin dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari tanggal 27 Juni s/d 27 September 2022. Ini merupakan kali ke 3 siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang melaksanakan Prakerin di Balai Besar POM di Palembang. Siswa ditempatkan di Unit Kearsipan, Subbagian Umum, Bagian Tata Usaha. Pada tanggal 27 September 2022 bertempat di Aula Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dilaksanakan acara Penarikan Siswa Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Negeri 8 Palembang. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan SMK Negeri 8 Palembang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Sri Sulistiowati, S.Pd dan Bapak Ahardi, S.Pd. Dari Balai Besar POM di Palembang dihadiri oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum Bapak Muhammad Asrul, S.Si., Apt., M.Kes. Dalam sambutannya, Bapak Muhammad Asrul menyampaikan bahwa penerimaan siswa Prakerin merupakan salah satu wujud nyata dan peran aktif BBPOM di Palembang dalam mendukung misi Badan POM yang pertama yaitu “membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Terkhusus kepada siswa-siswi, Muhamad Asrul berpesan agar apa yang didapat dari kegiatan Prakerin ini menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja ataupun bekal untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya Ibu Sri Sulistiowati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Balai Besar POM di Palembang atas kerjasama yang telah terjalin, dan kepada siswa-siswi Bu Sri berharap agar Prakerin ini menjadi sarana latihan untuk mengenal dunia kerja, disiplin waktu, sikap kerja, integritas, loyalitas dan kemampuan kerja untuk menghadapi dunia kerja.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM dengan wilayah kerja; Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam.

1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
- b. Subkelompok substansi umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:

- a. Kelompok Substansi Pengujian, terdiri atas:

1. Subkelompok substansi pengujian kimia; dan
2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi
- b. Kelompok Substansi Pemeriksaan, terdiri atas:
 1. Subkelompok substansi inspeksi; dan
 2. Subkelompok substansi sertifikasi
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi.

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

BBPOM di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 12 Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yang meliputi 168 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	16

2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	20
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

Tabel 1. Catchment Area BBPOM di Palembang

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2021, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 181 orang. Saat ini, SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang adalah 107 orang sehingga masih kekurangan 74 orang.

1.4 Isu Strategis : Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat /konsumen,

perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, kerawanan lintas-batas antar provinsi, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Palembang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2. Pandemic COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 18 April 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 2.324.731 kasus, dengan 160.434 kasus kematian, dan 595.467 kasus berhasil sembuh. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 18 April 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 6.248 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 meninggal dunia dan 631 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih

terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Palembang melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui online dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Palembang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Sumatera Selatan) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19 ataupun sebagai Anggota Satuan Tugas Pokja Komunikasi, Edukasi dan Informasi.

3. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, ASEAN-China *FTA*, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, ASEAN-Korea *Free Trade Agreement (AKFTA)*, ASEAN-India *Free Trade Agreement (AIFTA)* dan ASEAN-Australia-

New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang

Diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja di daerah Sumatera Selatan guna mengawal pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Kerjasama yang terjalin dengan stakeholder dan pemangku kepentingan* masih belum optimal, (ii) Koordinasi terkait pengawasan keamanan obat dan makanan masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut dan Rekomendasi Tindak lanjut pemeriksaan di *Competent Contact Point (CCP)* belum cepat dan belum optimal, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Palembang telah melakukan rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Satuan Karya Badan POM dengan Kwarcab Pramuka se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka jalan untuk pembentukan SAKA BPOM sehingga bisa memberdayakan potensi gerakan pramuka dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Selain itu telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat, Kunjungan Spesifik Anggota DPR RI Komisi IX di BBPOM Palembang, kegiatan advokasi ke Kabupaten Kota di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

5. Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

6. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

7. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Balai Besar POM di Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

11. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Balai Besar POM di Palembang sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

12. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

13. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

14. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM

Khusus untuk BBPOM di Palembang untuk industri makanan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dimana dahulunya sarana produksi MD masih dibawah 50 sarana saat ini sudah mencapai lebih dari 50 sarana yaitu sebanyak 59 sarana. Untuk sarana PIRT berjumlah sekitar 2.807 sarana.

15. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun tahun 2010 -2018 adalah 1,41 persen, tahun 2010-2019 adalah 1,42% dan tahun 2010-2020 adalah 1,25%.

16. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17. Adanya perkembangan teknologi informasi, dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Palembang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu

pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Palembang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG:

Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Revisi Renstra BPOM tahun 2021-2024, terdiri dari 29 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Persentase obat yang memenuhi syarat</p> <p>Persentase makanan yang memenuhi syarat</p> <p>Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat</p>
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang</p>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh</p>

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

		pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang

10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal.
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Palembang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun

investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,5% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 91% di tahun 2024
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 85% di tahun 2024
- Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94% di tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Palembang yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman

sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : $\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang } (B_1+B_2+B_3)}{\text{Total penyebut } (B_1+B_2+B_3)} \times 100\%$
- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label

- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

$$\text{Contoh : } \% B_3 = \frac{\text{Total pembilang (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)}}{\text{Total penyebut (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

$$\text{Contoh : } \% B_3 = \frac{\text{Total pembilang (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)} \times 100\%}{\text{Total penyebut (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)}}$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Pengujian.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :
- $$\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang } (B_1+B_2+B_3)}{\text{Total penyebut } (B_1+B_2+B_3)} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan

% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : “Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 83 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum[\sum(\bar{R} a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R} a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan

(a) dalam satu komoditi.

(b) adalah bobot penduduk (BPS)

(c) adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh

pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Palembang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 92,1 di tahun 2024.
- Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 80,01 di tahun 2024
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 93 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
 - a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
 - b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masingmasing bentuk

bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Cara Perhitungan:

- a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

- b. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan: $\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

- c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

- b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan

yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.

- c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
 4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan: dan Formula:

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum[\sum(\bar{R}^a \times b) \times c]$$

Keterangan: \bar{R}^a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS) c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palembang:
 1. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 2. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
 4. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
 5. Target dinyatakan dalam angka.
Cara Perhitungan:
Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Palembang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan

tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024
 - Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024
 - Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 4,55 di tahun 2024.
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target sebesar 81 di tahun 2024.
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
- 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat
dan diterima oleh UPT.

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait
yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$

Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan:

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
6. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$ A

A = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

B = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektro}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:

1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
 - d) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
 - e) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.

- f) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah		Full Audit	
Penanda tangan	Kepala Badan	Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

- g) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
- h) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- i) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- j) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- k) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- l) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
3. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

4. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:
 - 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
 - 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
 - 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
 - 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

- 5) SOP Makro
3. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
 - 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
 - 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 - 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 - 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
3. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

f. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - b. Profesionalitas SDM (18%);
 - c. Sarana Prasarana (15%);
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM M (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

g. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

1. Ruang Lingkup UMKM:

- ✓ UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

- b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
- ✓ UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - ✓ UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
2. UMKM yang memenuhi standar adalah:
- ✓ UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
 - ✓ UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
 - ✓ UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
3. Kriteria UMKM yang didampingi:
- ✓ Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - ✓ Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

- 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- ✓ Untuk UMKM Kosmetik:
1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

4. Tahapan Pendampingan UMKM

a) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

b) Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

c) Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 - 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb - 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb - 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

5. Cara Perhitungan:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya,

berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 98,3% di tahun 2024
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 97 di tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 32 di tahun 2024
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 17 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

1. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
2. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce.
3. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
4. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
5. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
6. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 - 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
7. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Cara Perhitungan Dan Formula:

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 - TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

c. Jumlah desa pangan aman

1. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
2. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

3. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
4. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :
 - 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5%	TW1-TW2
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober
			Post: November
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
9	Pengawalan	10%	Juni-Desember
Total Skor		100%	

d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

1. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

3. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
4. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
5. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
6. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
7. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
8. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli
6	Kampanye	10%	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran
- Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palembang.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
- b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.

- c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
= (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a. B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b. B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a. B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b. B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.
- b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A):
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat

dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
3. Tahapan Penindakan antara lain:
 - a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Cara Perhitungan dan Formula:

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara]

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,9;
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 82,9.

Defenisi Operasional:

a) Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.
2. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
3. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
4. 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
5. Tabel rincian bobot komponen pengungkit:
 - 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
 - 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
 - 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
 - 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
 - 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
 - 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

6. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil
 - 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%
 - 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
 - 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

Cara Perhitungan dan Formula:

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

b) Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
3. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.
4. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Cara Perhitungan dan Formula:

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan,

penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,25.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Cara Perhitungan dan Formula:

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 10. Menguatnya laboratorium , data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 92% di tahun 2024
- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

- a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan

Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

- b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Standar Ruang Lingkup > 65,
 - Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
 - Standar Alat Laboratorium > 70

Cara Perhitungan:

- Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BOC
- Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3: Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 98,9;
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 92,00% (Efisien).

Defenisi Operasional:

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang:
 1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Pengelolaan UP; 4) Rekon LPJ Bendahara; 5) Data Kontrak; 6) Penyelesaian Tagihan; 7) Penyerapan Anggaran; 8) Retur SP2D; 9) Perencanaan Kas (Renkas); 10) Pengembalian/Kesalahan SPM; 11) Dispensasi Penyampaian SPM; 12) Pagu Minus; 13) Konfirmasi Capaian Output.

Cara Perhitungan dan Formula:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang

1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input}) \times 100\%$
Standar efisiensi (SE) adalah 1
3. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$
Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.
4. Kriteria:
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$
5. Kriteria: Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Balai Besar/ Balai di tahun 2020-2021.

Cara Perhitungan dan Formula:

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien

5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

4.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Balai Besar POM di Palembang telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2022 mengacu pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Palembang 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Palembang T.A 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palembang. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2021 telah disusun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2022 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini. Adapun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,90
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,50
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,20
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard	100,00
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	64,00

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	83,90
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	80,90
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	84,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	98,70

Tabel.3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran
- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 30.567.108.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai Besar POM di Palembang menerima anggaran sebesar Rp. 30.567.108.000,00.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang disajikan dalam bentuk tabel dengan target per bulan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 4 pada Laporan Kinerja ini.

2.5 METODE PENGUKURAN & KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja

**BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPKIN INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2022**

Utama Balai Besar POM di Palembang yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Money yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Tabel 4.

Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Palembang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan baik triwulan maupun akhir tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 dengan tahun lalu dan membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2024, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan III Tahun 2022 penetapan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan III Tahun 2022 memuat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan. Pencapaian semua Sasaran Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan III Tahun 2022 yang merupakan periode tahun kedua dari periode Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria	Rata-rata Persfektif (%)
Sasaran Kegiatan Kategori Stake Holder Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1, 2 dan 3)				100,56
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	100,56	Memenuhi Ekspektasi	100,56
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di	0	Capaian di Akhir Tahun	0

	Palembang			
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	0	Capaian di Akhir Tahun	0
Sasaran Kegiatan Kategori Internal Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4, 5, 6 dan 7)				102,10%
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	95,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi	95,58%
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	98,03%	Belum Memenuhi Ekspektasi	98,03%
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	122,85%	Tidak Dapat Disimpulkan	122,85%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	91,95%	Belum Memenuhi Ekspektasi	91,95%
Sasaran Kegiatan Kategori Learning and Growth Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8, 9, 10 dan 11)				124,58%
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	0	Capaian di Akhir Tahun	0
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	0	Capaian di Akhir Tahun	0
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	138,10%	Tidak Dapat Disimpulkan	138,10%
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	111,06%	Memenuhi Ekspektasi	111,06%

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN	Memenuhi Ekspektasi	109,08%
---	------------------------	----------------

Tabel 5.
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2022
Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91,50	95,59	104,47
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,00	90,12	102,40
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	98,30	102,40
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	89,04	108,59
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00	78,16	84,96
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,00	Capaian di Akhir Tahun	0
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	89,90	Capaian di Akhir Tahun	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Makanan			
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12	Capaian di Akhir Tahun	0
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	Capaian di Akhir Tahun	0
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	80,00	87,87	109,84
		11. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65,00	39,45	60,69
		12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	97,75	97,75
		13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	39,22	65,36
		14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	66,00	68,60	103,94
		15. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	4,20	-	-
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	65,00	88,33	135,90

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	17.	pembuatan OT dan Kosmetik yang baik			
		17.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	75,00	90,21	120,28
		18.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	75,00	58,42	77,89
		19.	Jumlah Desa Pangan Aman	75,00	72,15	96,20
		20.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	75,00	73,33	97,77
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	21.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70,00	88,99	127,13
		22.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70,00	83,00	118,57
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	23.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	60,61	55,73	91,95
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	24.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	83,90	Capaian di Akhir Tahun	0
		25.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	80,90	Capaian di Akhir Tahun	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,75	Capaian di Akhir Tahun	0
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	82,00	Capaian di Akhir Tahun	0
		28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,10	2,9000	138,10
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	70	77,74	111,06

Tabel 6.

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2022

Sebagai salah satu upaya pengawalan pencapaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2022 BBPOM di Palembang telah melakukan cascading Indikator Kinerja dari level Eselon II hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Perjanjian Kinerja individu juga cascading dalam bentuk SKP yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Data dapat dilihat pada Lampiran 6 (contoh Perjanjian Kinerja Koordinator, Kabag TU dan subkoordinator serta Staf). Evaluasi SKP BBPOM di Palembang telah dilakukan setiap Triwulan secara online. Nilai SKP Triwulan III Tahun 2022 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan *reward&punishment*.

Analisis Akuntabilitas Kinerja (Penjelasan Capaian Sasaran Strategis) :

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 8 (delapan) indikator yang dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, sebanyak 5 (lima) indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, 3(tiga) indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi, dan 4 (empat) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan serta 9(sembilan) indikator yang tidak dapat dihitung di Triwulan III. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing

Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh BPOM di Palembang, adalah sebagai berikut :

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW3 2022	Realisasi TW3 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91,50	95,59	104,47	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 7.

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan 3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 95,59%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 91,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 104,47% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 ditemukan 37 sampel Tidak Memenuhi Syarat dari 839 sampel yang telah selesai dilakukan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat sampai dengan triwulan 3 adalah 95,59% bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 91,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 104,47% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan :

1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan serta sinergisme dengan pemerintah daerah.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian pada Triwulan 3 Tahun 2022.
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium setiap tahun sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4. Pemenuhan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk memberikan pembinaan dan pengawalan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
-	-	-	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW3 2022	Realisasi TW3 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88.00	90,12	102,40	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 8.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan 3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 90,12% dari target 88,00%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 102,40% dan masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 terdapat Makanan yang Tidak memenuhi Syarat sebanyak 34 sampel dari 344 sampel yang telah selesai diuji.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 90,12% dari target tahun 2022 sebesar 88,00%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini adalah 102,40% dan masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingginya persentase Makanan yang MS Triwulan 3 Tahun 2022 menunjukkan bahwa mutu Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palembang sudah baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengawasan yang dilakukan secara insentif dan berkelanjutan dan sinergisme dengan pemerintah daerah.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022.
 2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
 3. Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
 4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasikepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
 5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan oleh Pemda Kab / Kota
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
-	-	-	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW3 2022	Realisasi TW 3 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96,00	98,30	102,40	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 9.

Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan 3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 98,30%, bila dibandingkan dengan target 96,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 102,40% dan masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 terdapat sebanyak 294 sampel Obat targeted yang telah selesai diuji.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 98,30%, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 96,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 102,40% dan masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022, terutama untuk sampling Obat targeted

1. Tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat meningkat, sehingga produk yang beredar di pasaran dan yang dikonsumsi masyarakat merupakan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat.
2. Pengawasan terhadap produk Obat di sarana produksi dan sarana distribusi yang selalu dilaksanakan secara rutin, menerapkan *risk base inspection* dan *track record* sarana untuk dapat mendeteksi adanya produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat beredar di masyarakat dan di tingkat produsen.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Program / kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2022.

2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
 3. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
 4. Pemenuhan sarana penunjang pengujian (reagensia dan media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
 5. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait Obat dan Makanan
 6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
-	-	-	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW3 2022	Realisasi TW3 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	82.00	89,04	108,59	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 10.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan 3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 89,04%, bila dibandingkan dengan target 82,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 108,59% dengan kriteria Sesuai Ekspektasi. Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 terdapat sejumlah 73 sampel makanan targeted yang telah selesai dilakukan pengujian, dimana 8 diantaranya tidak memenuhi syarat.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 89,04%, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 82,00%, maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 108,59% dengan kriteria Sesuai Ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022, terutama sampling makanan targeted
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pemenuhankebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang

5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan CAPA sarana oleh BBPOM di Palembang

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
-	-	-	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW3 2022	Realisasi TW3 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00	78,16	84,96%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 11.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan 3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 78,16%, bila dibandingkan dengan target 92,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 84,96% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022, 87 sampel fortifikasi telah selesai dilakukan pengujian. Dari jumlah tersebut sejumlah 19 sampel berupa produk garam dinyatakan tidak memenuhi syarat.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat pada Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 78,16%, bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 92,00%, maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 84,96% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman sampling dan pengujian tahun 2022
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik ditingkat produksi maupun distribusi, terutama produk garam masih perlu ditingkatkan.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022
2. Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
4. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang
5. Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan CAPA sarana oleh BBPOM di Palembang

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
-	-	-	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu :

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84	0	0	-

Tabel 12.
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang diperoleh berdasarkan hasil survei Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Pada Triwulan III Tahun 2022, belum diperoleh hasil survei. Apabila dibandingkan dengan target Triwulan III Tahun 2022 sebesar 0%, maka capaian BBPOM Palembang adalah 0%.

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2021 sebesar 94,41%. Pada Triwulan III Tahun 2022 capaian Indeks Kesadaran Masyarakat belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. **Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tw 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	89,90	0	0%	-

Tabel 13.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan IIITahun 2022

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan IIITahun 2022 adalah 0%. Target BBPOM Palembang untuk indikator ini adalah 77,12%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang adalah 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 sebesar 94,03%. Pada Triwulan IIITahun 2022 capaian Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tw 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
-------------------	-------------	---------------------	-------------	----------

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12	0	0	-
---	-------	---	---	---

Tabel 14
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2022 adalah 0% dari target sebesar 77,12%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian BBPOM Palembang adalah sebesar 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 sebesar 94,91%. Pada Triwulan III Tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi Tw 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	0	0%	-

Tabel 15
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan III Tahun 2022 adalah 0% dari target sebesar 90%. Berdasarkan realisasi dibandingkan target maka capaian BBPOM Palembang adalah sebesar 0%.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021 sebesar 100,5%. Pada Triwulan III Tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM belum dapat dihitung karena belum dilaksanakan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

3.1.4 CAPAIANSASARAN KEGIATAN IV

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palembang

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 7 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW III 2022	Realisasi TW III 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	80	87,87	109,84%	Memenuhi ekspektasi

Tabel 16.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target TW 3 sebesar 80 %, dengan realisasi sebesar 87,87 % dan pencapaian sebesar 109,84 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Dari data tersebut, belum semua hasil pemeriksaan sarana ditindaklanjuti, hal ini harus ditingkatkan untuk triwulan berikutnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target tahun 2022 sebesar 99,50 %, dengan realisasi TW 3 sebesar 87,87 % dan pencapaian sebesar 109,84 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Capaian ini harus ditingkatnya di triwulan berikutnya di tahun 2022.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan**

1. Komitmen petugas dalam membuat surat keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan.

d. **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja**

1. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Adanya tool SiLisaMesra yang dibuat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang terupdate dan dapat dijadikan tool untuk memonitor hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	438	377	Monev berjenjang	Dilakukan per bulan

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

2. **Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder**

- b. Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW III 2022	Realisasi TW III 2022	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	65	39,45	60,69%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 17

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 39,45% bila dibandingkan dengan target 65,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 60,69% dan masuk dalam kriteria tidak efektif. Hasil tersebut telah mencapai target yang ditetapkan, namun hal ini harus terus ditingkatkan dan sehingga sampai tahun 2022 realisasi tetap memenuhi target.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 39,45% bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 65,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 60,69% dan masuk dalam kriteria tidak efektif. Hal ini menunjukkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan tidak cukup banyak direspon oleh pelaku usaha dan lintas sektor terkait.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Terlambatnya penyampaian rekomendasi/ surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana/ pelaku usaha dan lintas sektor terkait
2. Kepatuhan dari pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan petugas Balai Besar POM di Palembang masih kurang, sehingga masih banyak yang belum ditindaklanjuti.

3. Lambatnya tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor terkait atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Advokasi dan audiensi yang dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sehingga memberikan efek percepatan dalam menyampaikan feedback atas hasil pemeriksaan yang telah disampaikan.
2. Adanya Dana alokasi khusus (DAK) Triwulan II Tahun 2022 yang mensupport pemda untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang.
3. Adanya sarana komunikasi melalui WA Group BBPOM di Palembang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi.
4. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
5. Pengawasan bersama dengan pemerintah daerah di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di Kabupaten / Kota terkait.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
	433	191	Melakukan tindak lanjut ke lintas sector dan sarana	Per bulan

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3. **Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW3 2022	Realisasi TW3 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	97,75	97,75%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 18.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target Triwulan III Tahun 2022 dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 97,75% bila dibandingkan dengan target 100,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 97,75% dan masuk dalam kriteria Baik. Tentunya hal ini menjadi poin penting sebagai salah satu bentuk mewujudkan layanan publik yang paripurna terutama terkait layanan perizinan (PSB, SKI, dan SKE).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2019 dan 2020

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021 namun tidak dapat dibandingkan capaian dan realisasi tahun 2019.

Pada tahun 2020, realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 117.65%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi sebesar 99.84% dengan capaian sebesar 99.84%. Dari perbandingan tahun 2020 dan 2021 bahwa keputusan penilaian sertifikasi selalu diselesaikan tepat waktu.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Kompetensi petugas terkait alur proses perizinan / registrasi serta komitmen petugas dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha selama proses perizinan sampai terbit izin edar

2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan sesuai Service Level Agreement (SLA)
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer untuk dukungan percepatan penyelesaian pekerjaan
4. Dukungan bandwidth jaringan internet serta lancarnya aplikasi registrasi Obat dan Makanan serta SKI / SKE (e - BPOM)
5. Layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan UMKM melalui telepon, wa, dan email terutama selama masa pandemi Covid-19.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan pemberian rekomendasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.
 2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
 3. Pelaksanaan desk Registrasi Pangan Olahan secara daring bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk pendampingan pengurusan izin edar BPOM serta dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM.
 4. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Registrasi Pangan Olahan bagi pelaku usaha secara daring dan luring bersama Direktorat Pangan Olahan.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).**

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Peningkatan kompetensi petugas	-	Memanfaatkan pelatihan online dan offline BPOM	31 Desember 2022
2	Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung	-	Mengoptimalkan anggaran tahun 2022	31 Desember 2022

3	Pemanfaatan teknologi informasi	-	Memanfaatkan pelatihan online dan offline BPOM	31 Desember 2022
---	---------------------------------	---	--	---------------------

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW II 2022	Realisasi TW II 2022	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	39,22	65,36	Tidak efektif

Tabel 19.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 39,22% bila dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 65,36% dan masuk dalam kriteria tidak efektif. Hal ini menunjukkan berkurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 39,22% bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 65,36% dan masuk dalam kriteria tidak efektif. Capaian ini harus ditingkatkan, sehingga pada akhir Tahun 2022 tetap tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan CPPOB meningkat, baik MD maupun IRTP.
2. Telah dilakukan penyamaan persepsi antar inspektur pangan dalam menetapkan kategori temuan, sehingga keputusan terhadap hasil pemeriksaan dapat seragam

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Pangan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah cukup memberikan manfaat kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan guna pemenuhan CPPOB-IRTP.
2. Bimtek yang dilaksanakan oleh BPOM cukup optimal dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait penerapan CPPOB.
3. Peningkatan kompetensi SDM Pemda Kabupaten/kota dalam menunjang efektifitas pengawasan, antara lain bimtek dan pelatihan Food Inspektur, Pelatihan DFI (*District Food Inspector*) serta pelatihan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan).
4. Adanya WAG BBPOM di Palembang dan penanggung jawab sarana MD, sehingga menjadi wadah konsultasi bagi pelaku usaha terkait CPPOB.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
	152	66	Rencana Aksi	Time line
			Peningkatan komitmen pelaku usaha	Per bulan

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW III 2022	Realisasi TW III 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	66,00	68,60	103,94	Memenuhi ekspektasi

Tabel 20.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 68,60% bila dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 66,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 103,94% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha telah banyak melakukan perbaikan secara konsisten terkait temuan yang ada dalam upaya jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 68,60% bila dibandingkan dengan target Tahun 2022 sebesar 66,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 103,94% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Capaian ini akan terus dipertahankan sehingga pada TA 2022 tetap masuk dalam kategori sangat baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sehingga temuan dapat menurun.
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai dampak pengawasan dan KIE yang telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan,

termasuk aplikasi Cek BPOM dan tagline Cek KLIK sehingga temuan produk TMK di sarana distribusi semakin menurun.

3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan di sarana distribusi Obat dan Makanan
4. Peran aktif lintas sektor terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di sarana distribusi melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan seperti Cara Ritel Pangan yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan, mutu Obat dan Makanan di rantai distribusi.
2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, dimana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait
4. Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait Obat dan Makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
	450	656	Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah	Per bulan

			Sumatera Selatan	
--	--	--	------------------	--

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

6. Indeks Pelayanan Publik

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tw II 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,20	0	0	-

Tabel 21.

Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Triwulan III Tahun 2022

Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 masih dalam Penilaian oleh Tim Penilai UPP Badan POM. Nilai Indeks Pelayanan Publik akan dievaluasi di TW IV Tahun 2022.

7. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

Indikator ini merupakan indikator yang sama sekali baru muncul di Tahun 2022.

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW 2 2022	Realisasi TW 2 2022	Capaian (%)	Kriteria
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	77	88,33	114,71	Baik

Tabel 22.

Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 114,71%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2021

Indikator kinerja UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT ini sama sekali baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar.
2. Belum terlaksananya bimbingan teknis terhadap UMKM yang akan didampingi.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan UMKM.
 2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
 3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap UMKM yang akan di dampingi.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Peningkatan kompetensi petugas	-	Memanfaatkan pelatihan online dan offline BPOM	31 Desember 2022
2	Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung	-	Mengoptimalkan anggaran tahun 2022	31 Desember 2022
3	Pemanfaatan teknologi informasi	-	Memanfaatkan pelatihan online dan offline BPOM	31 Desember 2022

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

**5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI
(KIE) OBAT DAN MAKANAN**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw III 2022	Realisasi Tw III 2022	Capaian Tw III 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	95,4	75	90,21	120,28%	94,56%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 23.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan III Tahun 2022

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022**

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 90,21 dari target sebesar 75,00 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 120,28% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

- b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022**

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 90,21 dari target sebesar 95,40

sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 94,56% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan III adalah 90,21. Nilai tersebut naik bila dibandingkan dengan TW II sebesar 87,16; namun bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 96,60 ; mengalami penurunan sebesar 6,39%.

Dari nilai tersebut, komponen yang paling rendah ialah ragam kegiatan dan minat dari masyarakat.

Penyebab kegagalan :

1. Ragam / jenis kegiatan KIE Obat dan Makanan yang masih belum dikenal ataupun bersentuhan langsung dengan masyarakat.
2. Minat masyarakat terkait program kegiatan KIE Obat dan Makanan masih rendah.

Solusi yang dilakukan :

1. Perlu dilakukan KIE berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga masyarakat dapat mengenal dan memperoleh dampaknya.
2. Menambahkan media promosi KIE obat dan makanan, sehingga menambah rasa ingin tahu dan minat masyarakat.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2022, Balai POM di Palembang sudah melaksanakan 13 (tiga belas) kali kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat yang diselenggarakan baik oleh Balai maupun bersama Deputi IV BPOM. Selain itu, Kegiatan Pameran juga sudah terselenggara dan kegiatan KIE lain seperti *car free day* , bimbingan teknis, dan penyebaran informasi langsung kepada masyarakat juga sudah dilakukan. KIE secara tidak langsung melalui media sosial seperti di SMS Blast, Instagram, Facebook, dan Twitter, serta berita aktual yang ditayangkan di subsite Balai POM juga sudah dilakukan secara rutin.

Untuk mencapai nilai Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang efektif dapat diperoleh dengan cara :

- Adanya variasi program KIE yang lebih dekat dengan masyarakat, misal di transportasi dan fasilitas umum.
 - a. Hambatan pelaksanaan program diantaranya :
 - ✓ Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Kegiatan KIE menjangkau masyarakat di daerah		Kegiatan KIE tambahan bersama Tokoh masyarakat di 2 titik kabupaten/kota	Minggu ke-1 November
2.	Kegiatan Promosi terkait KIE Obat dan Makanan		Program pemasangan iklan KIE di transportasi / fasilitas umum	Minggu ke-2 November

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target Tw III 2022	Realisasi TW III 2022	Capaian Tw III 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59 (100%)	75 %	58,42%	77,89%	58,42 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 24.

**Capaian indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Aman Triwulan III Tahun 2022**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Target Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan III Tahun 2022 adalah sebanyak 75%. Realisasi Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan III Tahun 2022 adalah 58,42%; sehingga capaian yang diperoleh berdasarkan realisasi terhadap target pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 77,89%. Kegiatan PJAS sampai Triwulan III Tahun 2022 yang sudah terlaksana yaitu tahapan kegiatan advokasi lintas sektor dari seluruh kabupaten/kota yang akan diintervensi, sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan PJAS sekolah, serta sebagian audit kantin sekolah.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai akhir Triwulan III Tahun 2022 adalah 58,42%. Kegiatan PJAS sampai Triwulan III Tahun 2022 yang sudah terlaksana yaitu tahapan kegiatan advokasi lintas sektor dari seluruh kabupaten/kota yang akan diintervensi, sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan PJAS sekolah, serta sebagian audit kantin sekolah.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Penyebab kegagalan :

Rangkaian kegiatan PJAS yang belum dilakukan ialah sebagian audit kantin sekolah dalam rangka sertifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan keamanan PJAS yang harus dilakukan secara berurutan untuk semua sekolah.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Rangkaian kegiatan PJAS yang belum dilakukan ialah sebagian audit kantin sekolah dalam rangka sertifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan keamanan PJAS yang harus dilakukan secara berurutan untuk semua sekolah.

Tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan disusun jadwalnya agar tercapai 100% sebelum TW IV 2022 berakhir.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Pemberian Paket Edukasi		Pemberian Paket Edukasi secara bertahap untuk sekolah yang diintervensi	Minggu ke-2 Oktober
2.	Kegiatan Audit kantin sekolah dalam rangka sertifikasi		Kegiatan Audit kantin sekolah dalam rangka sertifikasi di luar kota dan dalam kota Palembang	Minggu ke-1 November
3.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		Monitoring dan evaluasi dilakukan terpadu untuk kegiatan program prioritas nasional	Minggu ke-1 Desember

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW III 2022	Realisasi TW III 2022	Capaian Tw III 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	19 (100%)	75 %	72,14 %	96,19 %	72,14 %	Kurang Memenuhi Ekspektasi

Tabel 25

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2022

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Target progress tahapan program Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan III Tahun 2022 adalah 75%, sedangkan realisasi progres tahapan Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 72,14%. Berdasarkan angka realisasi terhadap target TW III tersebut capaian yang diperoleh adalah sebesar 96,19%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi progres tahapan Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai akhir Triwulan III Tahun 2022 adalah 72,14%. Tahapan kegiatan desa pangan aman yang belum dilakukan ialah fasilitasi tahap II, monitoring dan evaluasi kegiatan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Realisasi progres tahapan Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai akhir Triwulan III Tahun 2022 adalah 72,14%. Tahapan kegiatan desa pangan aman yang belum dilakukan ialah fasilitasi tahap II, monitoring dan evaluasi kegiatan. Penyebab realisasi belum mencapai target karena proses kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Penyebab realisasi belum mencapai target karena proses kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun, sehingga tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan disusun dan dijadwalkannya agar tercapai 100% sebelum TW IV 2022 berakhir.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Kegiatan Fasilitasi		Kegiatan Fasilitasi Tahap II desa di luar kota dan	Minggu ke-4

	Tahap II		dalam kota Palembang	Oktober
2.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		Monitoring dan evaluasi dilakukan terpadu untuk kegiatan program prioritas nasional	Minggu ke-1 Desember

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

4. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW III 2022	Realisasi TW III 2022	Capaian Tw III 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	9 (100%)	75 %	73,33 %	97,77 %	73,33%	Kurang Memenuhi Ekspektasi

Tabel 26.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Target progress tahapan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang Triwulan III Tahun 2022 adalah 75%, sedangkan realisasi progres tahapannya adalah 73,33%. Berdasarkan angka realisasi terhadap target TW III tersebut capaian yang diperoleh adalah sebesar 97,77%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Target progress tahapan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Palembang Triwulan III Tahun 2022 adalah 75%, sedangkan realisasi progres tahapannya adalah 73,33%. Berdasarkan angka realisasi terhadap target TW III tersebut capaian yang diperoleh adalah sebesar 97,77%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab realisasi belum mencapai target karena proses kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun. Untuk kegiatan sampling dan pengujian masih terkendala test kit mikrobiologi yang belum tersedia.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Penyebab realisasi belum mencapai target karena proses kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun, sehingga tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan harus disusun dan dijadwalkannya agar tercapai 100% sebelum TW IV 2022 berakhir. Test kit mikrobiologi sudah dipesan untuk mengujia parameter mikrobiologi.

a. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Kampanye Pasar		Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Oktober Minggu Ke-2
2.	Kegiatan sampling dan Pengujian Tahap II		Kegiatan sampling dan Pengujian Tahap II Pasar Aman di luar kota dan dalam kota Palembang	Minggu ke-2 November
3.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		Monitoring dan evaluasi dilakukan terpadu untuk kegiatan program prioritas nasional	Minggu ke-1 Desember

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

6. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tw3 tahun 2022 (%)	Realisasi Tw 3 tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70,00	88,99	127,13	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 27.

Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 88,99% dari target sebesar 70%, sehingga capaian yang diperoleh sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 sebesar 127,13% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 88,99% dari target tahun 2022 sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap target tahun 2022 sebesar 88,99% .

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2022

1. Kesesuaian parameter uji yang dilakukan dalam proses pengujian sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 dengan Pedoman Sampling Tahun 2022
2. Pemenuhan timeline pengujian pada triwulan 2 tahun 2022

3. Pemenuhan pemeriksaan ED dan penandaan sampel pada triwulan 3 tahun 2022

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
 2. Pemilihan parameter uji dalam proses pengujian sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022
 3. Peningkatan kemampuan uji Balai, termasuk di antaranya verifikasi Metode Analisa dan uji profisiensi yang dilakukan pada Triwulan 3 Tahun 2022.
 4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian (alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang, dll)
 5. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini
 6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
-	-	-	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Triwulan 3 tahun 2022 (%)	Realisasi Triwulan 3 tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70,00	83,00	118,57	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 28

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan 3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 83,00% dari target sebesar 70%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 118,57% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 83,00% dari target tahun 2022 sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 83,00%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Kepatuhan terhadap Pedoman sampling Tahun 2022. Parameter uji yang dilakukan pada Triwulan 3 Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022
2. Pemenuhan timeline pengujian pada triwulan 3 tahun 2022
3. Pemenuhan pemeriksaan sampel sesuai standar, termasuk pemeriksaan terhadap ED dan penandaan sampel pada triwulan 3 tahun 2022

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian

3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini
 4. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling dan pengujian tahun 2022
 5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.
 6. Penindakan secara pro-justicia yang dilakukan kepada pelaku usaha melanggar peraturan, mampu memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan untuk menjual produk pangan yang berbahaya.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
-	-	-	-	-

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan. Uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW-III 2022	Realisasi TW-III 2022	Capaian (%)	Kriteria
-------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------

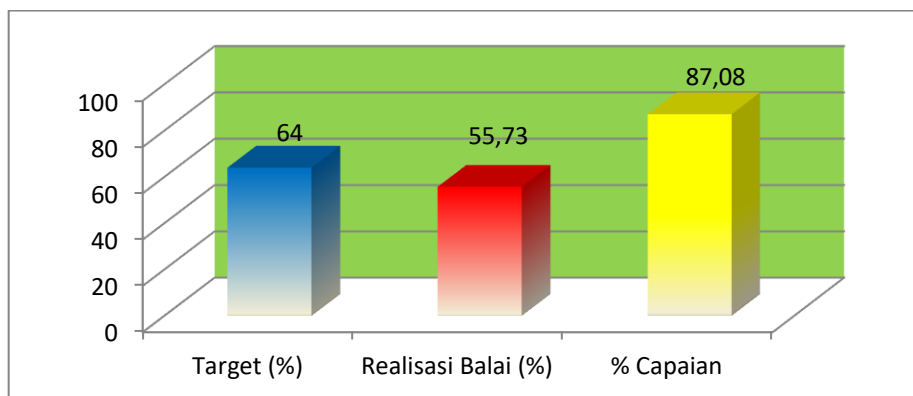
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	60,61%	55,73%	91,95%	Belum Memenuhi Ekspektasi
---	--------	--------	--------	----------------------------------

Tabel 29.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan III Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan III Tahun 2022 adalah 55,73% dari target sebesar 60,61% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 91,95% dengan kriteria kurang efektif.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap Target tahun 2022



Grafik 3.1.7.1
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 55,73%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 64,00%, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 87,08%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya target kinerja pada Triwulan III Tahun 2022 adalah :

- a. Masih adanya perkara yang belum meningkat ke tahap berikutnya (tahap 1, P21 ataupun tahap 2) serta masih terdapat 2 target yang belum terpenuhi
- b. Meskipun ada berkas perkara *carry over* yang dapat dilanjutkan ke tahap II (penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi), namun masih ada berkas perkara *carry over* lain yang tidak dapat dilanjutkan karena tersangka dan calon tersangka tidak diketahui keberadaannya dan ada berkas perkara *carry over* P19 yang tidak dapat dipenuhi petunjuk dari JPU karena saksi yang akan di BAP melarikan diri.
- c. Keterbatasan kemampuan investigasi untuk menemukan target penjahat dengan nilai ekonomi besar.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target kinerja Substansi Penindakan ditunjang program / kegiatan yang terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Dalam proses pemberkasan, dilakukan upaya persuasif agar tersangka dan calon tersangka dapat memenuhi panggilan selama proses penyidikan.
 - b. Melakukan tindak lanjut dari laporan informasi yang disampaikan ke Substansi Penindakan
 - c. Melakukan koordinasi/konsultasi dalam melaksanakan Penyidikan Bersama mulai dari Operasi Penindakan.
 - d. Briefing kepada petugas pendamping terkait upaya yang perlu dilakukan pada saat di TKP.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**
1	64	55,73	Rencana Aksi Time line

			<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat proses pemberkasan perkara - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait - Monev berjenjang 	Dilakukan per bulan
--	--	--	---	---------------------

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama yaitu :

1. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	83,90	0	0	0	-

Tabel 30.

Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW2 TA 2022

Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 0 dari target 2022 sebesar 83,90 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 0%.

Capaian Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021 sebesar 100,05% (Target: 82,90 dan Realisasi: 82,94). Pada Triwulan III Tahun 2022 capaian Indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

2. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Pada akhir Triwulan III Tahun 2022 sudah ada nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, yaitu hasil evaluasi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Lapkin BBPOM di Palembang TA 2020.

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	80,90	0	0	0	-

Tabel 31.
Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW2 TA 2022

Realisasi Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 0 dari target 2021 sebesar 80,90 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 0%.

Capaian Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2021 sebesar 97,11% (Target: 79,9 dan Realisasi: 78,87). Pada Triwulan III Tahun 2022 capaian Indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

9. TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Adapun Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW2 2022	Realisasi TW2 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,75	0	0	0	-

Tabel 32.
Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Triwulan III Tahun 2022 adalah 0 dari target 2022 sebesar 84,75 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2022 sebesar 0%.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022 sebesar 99,69% (Target: 84,5 dan Realisasi: 84,24). Pada Triwulan III Tahun 2022 capaian Indeks Profesionalitas ASN belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pada akhir tahun.

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Penilaian indikator ini akan dilakukan oleh P3OMN pada triwulan ke 4.

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal

Target, Realisasi dan Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW3 2022	Realisasi TW3 2022	Capaian Terhadap Target TW3 (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,25	2,100	2,9	138,10	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 33.

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW3 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang optimal sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 2,9 dari target sebesar 2,10, sehingga capaian yang diperoleh adalah 138,10% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang yang optimal sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2022 adalah 2,9 dari target sebesar 2,25, sehingga capaian yang diperoleh adalah 128,89% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan naiknya Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi :

- a. Pemanfaatan SIPT walaupun sudah optimal namun masih perlu dipertahankan karena nilai indeks= 3.
- b. Pengelolaan Data melalui SPIMKER sudah berjalan walaupun informasi yang didapat secara manual, petugas infokom yang akan menginput di aplikasi SPIMKER.
- c. Pemanfaatan Email corporate sudah cukup optimal dengan indeks: 3.
- d. Sudah optimalnya pemanfaatan sharing folder sebagai salah satu sumber informasi dengan realisasi 3 indeks pemanfaatannya.
- e. Penggunaan BOC sudah optimal dengan nilai indeks 3
- f. Pemanfaatan Berita Aktual juga sudah baik pada indeks 3 walau masih perlunya peningkatan jumlah upload berita aktual terkait kegiatan Balai dalam Waktu 1 (satu) bulan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal. Seperti KIE, talkshow, bimtek, workshop dan lain sebagainya.
- g. Nilai SPIMKER indeksnya di posisi 2.

Sejauh ini solusi yang telah dilakukan antara lain:

- Untuk SIPT telah dilakukan inventarisir masalah-masalah yang dihadapi selama penggunaan SIPT dan telah dilaporkan ke Pusdatin melalui admin SIPT BBPOM Palembang.
- Lebih mengintensifkan penggunaan data dan informasi dari sharing folder BPOM, Dashboard BOC dan email corporate.
- Lebih meningkatkan publikasi pemberitaan melalui website Badan POM dan subsite BBPOM di Palembang

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pengawasan iklan, sampling dan pengujian tetap dilakukan secara konsisten dan tepat waktu diinput ke aplikasi SIPT.
2. Tetap aktif memanfaatkan email corporate, spamker, sharing folder dan Dashboard BOC.
3. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data & informasi
4. Telah dibentuk Wag Medsos untuk memantau ketepatan dan kesiapan kelompok/subkelompok dalam memberitakan kegiatan strategis yang telah dilakukan selama 1x24 jam.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II ke Triwulan III:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Meningkatkan sosialisasi website BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook)	Sudah dilaksanakan dengan Baik dan hasil melebihi ekspektasi/tidak Dapat Disimpulkan	Akan dilihat target tahun depan untuk dapat disesuaikan kembali	Januari 2023

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.1.11 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

11. TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG SECARA AKUNTABEL

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Indikator Kinerja	Target 2022	Target TW3 2022	Realisasi TW3 2022	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	98,70	70,00	77,74	111,06	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 34.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan III Tahun 2022

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 3 Tahun 2022**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW3 tahun 2022 adalah 77,74% dari target TW3 sebesar 70% sehingga capaian yang diperoleh pada TW3 tahun 2022 sebesar 111,06% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan 3 Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2022**

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TW3 tahun 2022 adalah 77,74% dari target tahun 2022 sebesar 98,70% sehingga capaian yang diperoleh pada TW3 tahun 2022 sebesar 78,76% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.**

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai IKPA dan nilai EKA, di mana capaian untuk masing - masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Berdasarkan data OMSPAN nilai IKPA BBPOM di Palembang TW3 tahun 2022 sebesar 97,27%, telah dilakukan monev secara berkala terhadap capaian dari 8 indikator penilaian IKPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output). Ada beberapa indikator yang tidak tercapai

100%, yaitu :deviasi halaman III DIPA (78,24%), Belanja KONtraktual (98,50%) dan pengelolaan UP dan TUP (95,91%).

Analisis Penyebab Keberhasilan Nilai IKPA:

- Adanya Monev Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan
- Adanya Revisi halaman III DIPA setiap triwulan walaupun masih terjadi deviasi yang signifikan akibat kurang optimalnya penyusunan halaman III DIPA tersebut.

b. Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai Besar POM di Palembang TW3 tahun 2022 sebesar 64,72. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang untuk meningkatkan Nilai EKA, antara lain :

1. Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan Balai Besar POM di Palembang.
2. Melakukan Monitoring Capaian Output dan Anggaran perbulan beserta kendala dan rencana tindak lanjut.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

1. Melakukan secara lebih cermat kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.
2. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Monitoring Capaian Output dan Anggaran Perbulan	IKPA OK	Meningkatkan Nilai EKA dengan mengoptimalkan capaian output.	31 Desember 2022

Ket:

*diisi dengan bentuk rincian tindaklanjutnya

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan TW3 Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp.30.567.108.000,-. (Dalam nilai ini ada blokir anggaran sebesar Rp.2.275.369.000) di bulan Agustus dibuka blokir tukin dan adana penambahan belanja pegawai sehingga anggaran 2022 menjadi Rp 31.471.608.000 (Dalam ini ini ada blokir sebesar Rp.1.376.459.000).

Jenis Belanja	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	Rp 12.130.000.000	Rp 9.035.213.670	74,49%
Belanja Barang	Rp 15.740.163.000	Rp 10.829.337.980	68,80%
Belanja Modal	Rp 3.601.445.000	Rp 2.896.672.049	80,43%
Total Belanja	Rp 31.471.608.000	Rp 22.761.223.699	72,32%

Tabel 39.
Realisasi Anggaran TW 3 Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja 2022

Realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan Triwulan III Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	487.649.000	411.836.948	84,45%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	255.042.500	203.771.386	79,90%

		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	487.649.000	411.836.948	84,45%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	282.609.500	213.827.761	75,66%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	27.567.000	10.056.375	36,48%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	135.000.000	52.884.180	39,17%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	167.878.600	87.856.903	52,33%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	198.105.000	62.603.830	31,60%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	55.511.800	46.444.304	83,67%
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	57.300.200	33.005.390	57,60%
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	57.300.200	33.005.390	57,60%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	267.200.000	85.178.375	31,88%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	83.490.000	77.119.375	92,37%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	458.401.600	264.043.117	57,60%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik	66.800.000	21.294.594	31,88%

		yang baik			
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	101.431.000	35.645.888	35,14%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	1.832.040.000	1.599.281.828	87,30%
		Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	671.514.400	351.427.612	52,33%
		Jumlah Desa Pangan Aman	792.420.000	250.415.321	31,60%
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	222.047.200	185.777.214	83,67%
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	1.544.400.000	1.142.587.765	73,98%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	1.029.600.000	761.725.177	73,98%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	850.009.000	275.128.470	32,37%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang Optimal	Indeks RB UPT	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%
		Nilai AKIP UPT	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	2.780.955.000	2.090.763.350	75,18%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%

Tabel 40.
Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Triwulan III Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan TW3 tahun 2022 belum semua capaiannya dapat dihitung pada TW3 tahun 2022, yang dapat dihitung ada 7(tujuh) Sasaran Kegiatan TW3 tahun 2022 . Adapun hasil penilaian capaiannya sebagai berikut :

1. Memenuhi Ekspektasi (Efektif)

- a. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
- b. Sasaran Kegiatan 11 “Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel”.

2. Tidak Dapat Disimpulkan

- a. Sasaran Kegiatan 6 “Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
- b. Sasaran Kegiatan 10 yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”.

3. Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)

- a. Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang”
- b. Sasaran Kegiatan 5 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang”
- c. Sasaran Kegiatan 7 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang”

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar sebesar 72,32% (Rp. 22.761.223.699) dari Rp.31.471.608.000 Anggaran Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 31,60% sampai dengan 92,37%.

4.2 Saran

BBPOM di Palembang terus berkomitmen meningkatkan kinerja, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain :

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada TW4 tahun 2022.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.

- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Mengaktifkan kembali Tim Medsos dan IT BBPOM di Palembang dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.
- n. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai





BADAN POM

***LAMPIRAN
LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN III
TAHUN 2022***

**BALAI BESAR POM
DI PALEMBANG**



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor: HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

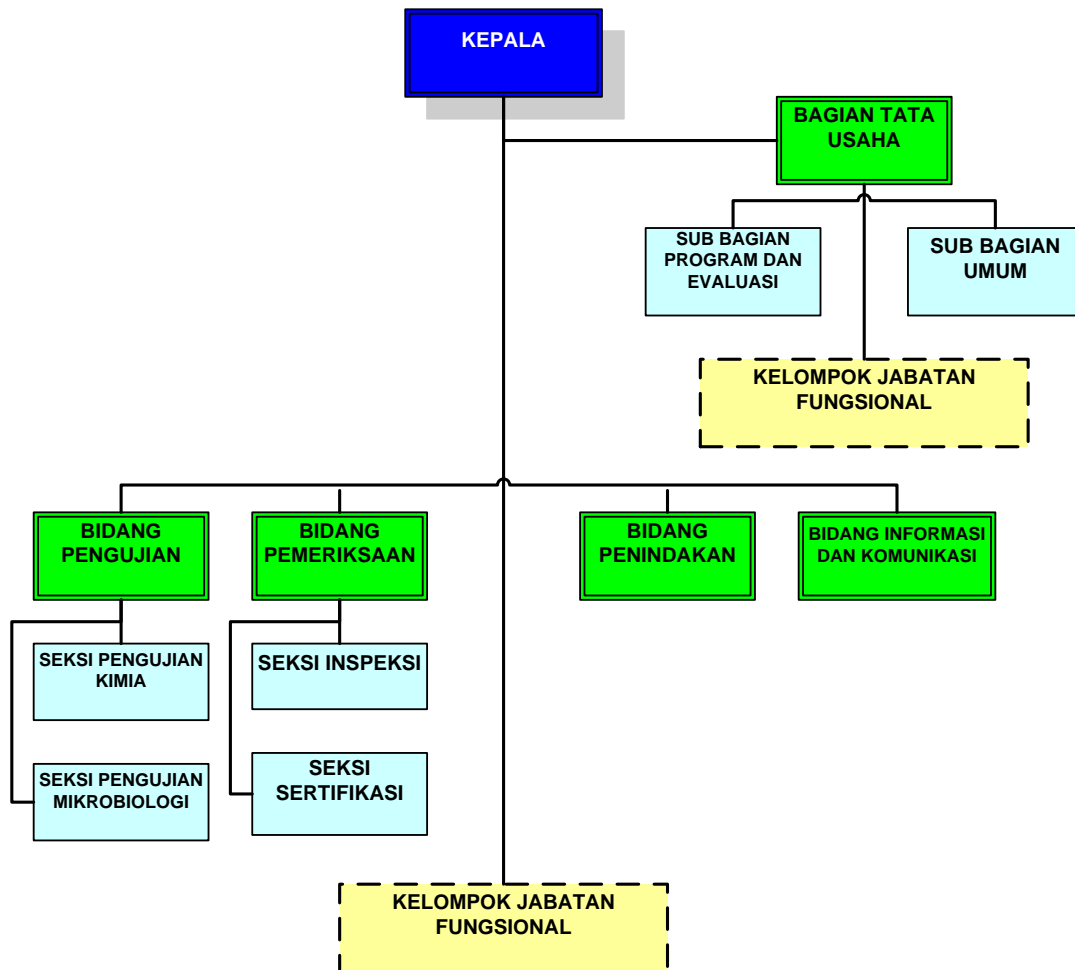
BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

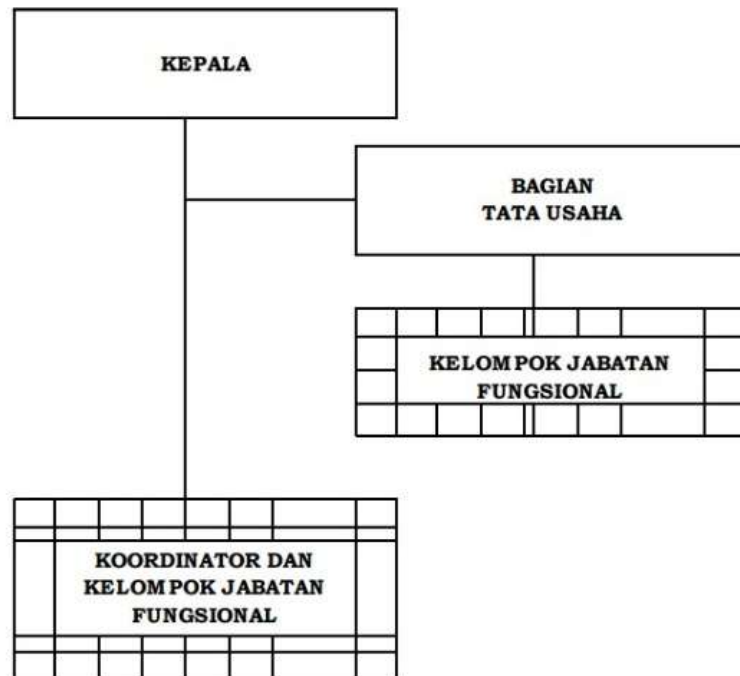
1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM



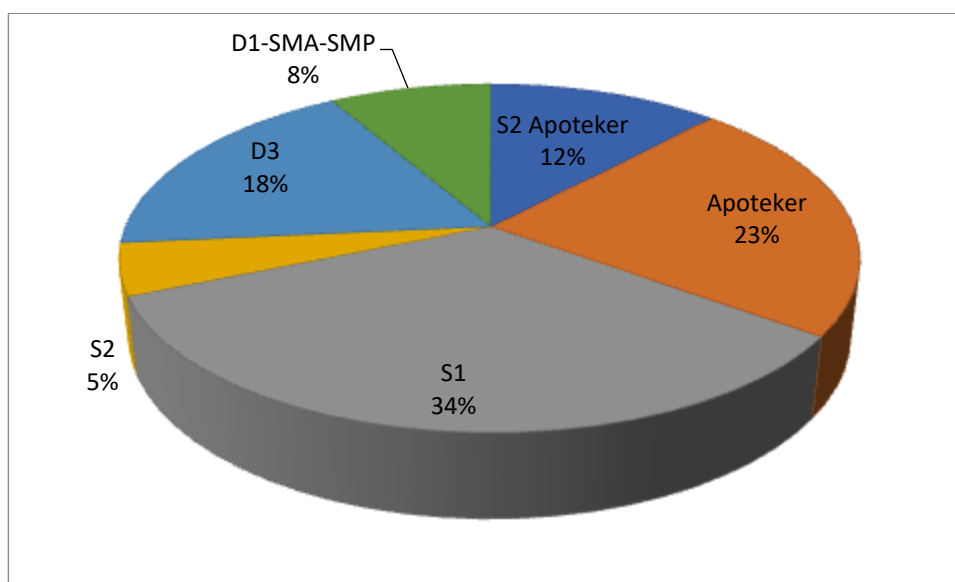
Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Palembang yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BPOM 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 181 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Oktober 2021 sejumlah 83 orang dengan proporsi 73,49% perempuan dan 26,51% laki-laki yang tersebar di masing-masing kelompok/subkelompok substansi dan bagian di Balai Besar POM di Palembang. Jumlah SDM BBPOM di Palembang tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Balai Besar POM di Palembang memerlukan SDM sebesar 181 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 98 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang.



Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi apoteker masih mendominasi. Balai Besar POM di Palembang sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	91,19	112,86
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	86,52	110,92
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,09	100,09
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	79,66	106,21
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	72	78,14	108,53
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,24	104,56
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,50
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	9. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87	98,87	113,64
		10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	55	63,76	115,93
		11. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	100	117,65
		12. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50	20,62	41,24%
		13. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	61,80	103,00
		14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	3,51	3,80	108,26
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,	15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	16.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100
		17.	Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100
		18.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	2	100
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	19.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82	95,88	116,93
		20.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	75	98,81	131,75
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	21.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	81,72	96,14
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	78,87	97,37

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	85,29	113,72
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	70	70,50	100,71
		26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,51	2,5	165,56
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	97,86	105,23
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (100%)	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Palembang selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Palembang dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna

mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Palembang juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/ pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratory (BSL) 2* yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Palembang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra BBPOM di Palembang tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BBPOM di Palembang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

- 2) Peran BPOM di Palembang dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BPOM di Palembang masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid*.
 - 2) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM di Palembang dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM di Palembang mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**
Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.
- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”**
Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*).
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”**
khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme

rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Palembang; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Palembang dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. **Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis**

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Palembang** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		

	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya	1. Persentase		

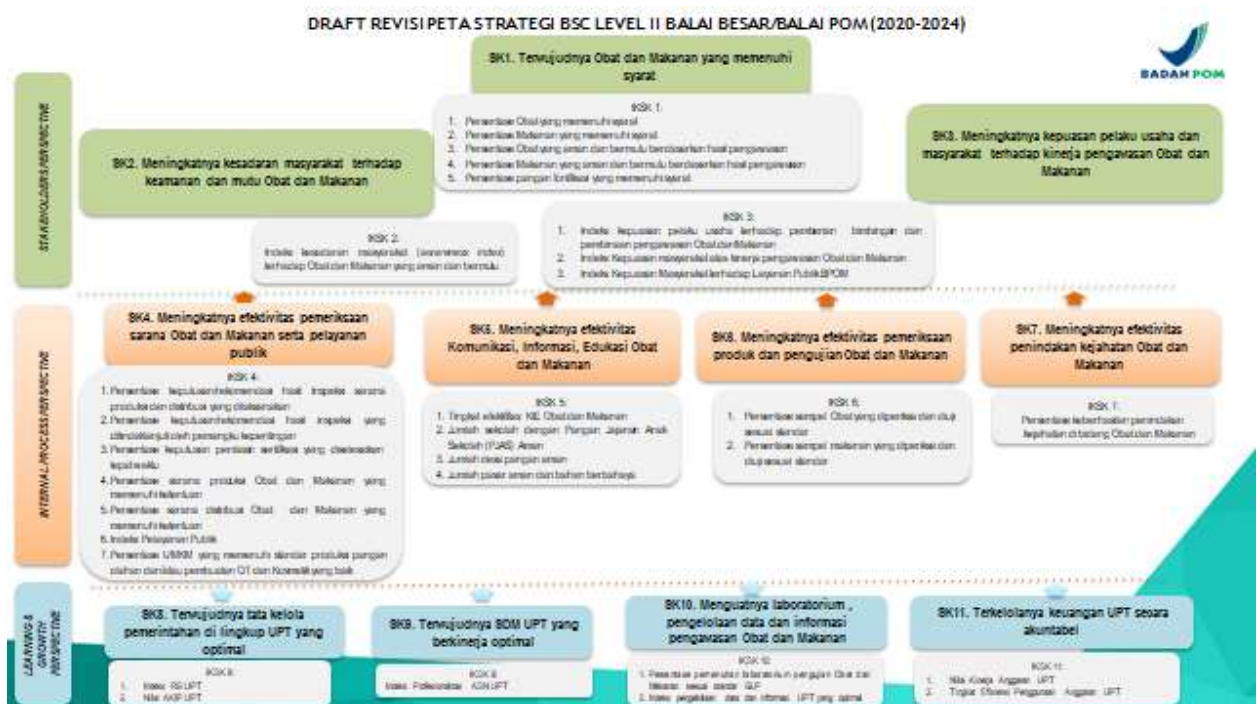
	efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

	masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan: *) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar POM di Palembang

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Palembang yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BBPOM di Palembang sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan BBPOM di Palembang

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Palembang, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BBPOM di Palembang, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Palembang harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BBPOM di Palembang Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai dengan Perubahan Arahan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan	4. Peningkatan pemahaman,

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Palembang

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Palembang sesuai Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Palembang mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Palembang, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024. Kedua kerangka tersebut

masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Palembang dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Palembang yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 2 BPOM, tidak terdapat perubahan** pada level sasaran strategis namun pada level indikator ada yang bertambah seperti Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada yang dihilangkan yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang serta **dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 28 (dua puluh delapan) IKU BPOM sebelumnya, secara umum target tetap dan meningkat dan saat ini dengan bertambahnya 2(dua) indikator kinerja dan berkurangnya 1(satu) indikator kinerja total indikator menjadi 29(dua puluh sembilan) Indikator kinerja utama. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Palembang**, di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).
- b. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**, di mana penurunan target di sebabkan baseline data tahun 2020 kenaikan indeks tidak terlalu tinggi sehingga progress dari tahun ke tahun perlu diturunkan agar capaiannya maksimal di tahun 2024, namun hal ini dapat direviu kembali di tahun 2022.

- c. **Persentase Saran Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**, di mana penurunan target disebabkan capaian tahun 2020 jauh dibawah target diakibatkan banyaknya sarana industri rumah tangga pangan yang masih perlu dibina agar memenuhi ketentuan.
- d. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dimasing-masing wilayah kerja BPOM di Palembang**, hal ini karena pada tahun 2020 terjadi penurunan target karena refocusing anggaran pada masa pandemi sehingga capaian target kumulatif diturunkan disesuaikan dengan penurunan umlah sekolah di tahun 2020.
- e. **Indeks RB dan Nilai AKIP**. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	80,8	83,6	86,6	90	92,3	91,19	91	91,5	92	92,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	78	80	82	84	86	86,52	86,5	88	89,5	91
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	95	95	96	96	97	95,09	95	96	96,5	97
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	75	76	77	78	80	79,66	80	82	83	85
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	91	92	93	94
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	78,14	81	84	86	89

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90	87,67	88,8	89,9	91	92,1	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	90	90,5	91	92	91,74	91,75	92	92,5	93	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95	98,87	99	99,5	100	100	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75	63,76	60	65	70	75	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97	100	100	100	100	100	
	<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	50	55	60	65	70	20,62	55	55	60	65	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
	<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	60	63	66	68	71	61,80	63	66	68	71	
	Indeks Pelayanan Publik						3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							-	77	79	81	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	93,79	94	95,4	96,8	98,3	
	<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	20	40	62	82	104	16	40	59	78	97	
	<i>Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	6	12	19	25	32	4	12	19	25	32	
	<i>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	3	6	9	13	17	2	6	9	13	17	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	82	85	88	91	94	95,88	100	100	100	100
	<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	75	77	80	83	85	98,81	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan</i>	52	58	64	69	75	56,74	58	64	69	75
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	<i>Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	85	89	93	94	95	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9
	<i>Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	81	85	90	91	92	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91	85,29	84,5	84,75	85	85,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	70,50	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1,51	2	2,26	2,5	3	2,5	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	yang optimal										
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (90%)</i>	<i>Efisien (92%)</i>	<i>Efisien (94%)</i>	<i>Efisien (96%)</i>	<i>Efisien (99%)</i>	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (100%)</i>	<i>Efisien (93%)</i>	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BBPOM di Palembang serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BBPOM di Palembang Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	Kepala Bidang Pengujian	Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	
3	Kepala Bidang Pemeriksaan	
4	Kepala Bidang Penindakan	
5	Kepala Seksi Pengujian Kimia	
6	Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi	
7	Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaaa	
8	Kepala Seksi Sertifikasi Bidang Pemeriksaan	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	Kelompok Jabatan Fungsional
10	Kepala Sub Bagian UMUM	

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Palembang secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Palembang 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI PALEMBANG
 PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									UPT BPOM			
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang											
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	80,8	83,6	86,6	90	92,3	1	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	91,19	91	91,5	92	92,5	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM		
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	78	80	82	84	86	2	<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	86,52	86,5	88	89,5	91	Pro PN		UPT BPOM		
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95	95	96	96	97	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95,09	95	96	96,5	97			UPT BPOM		
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	75	76	77	78	80	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	79,66	80	82	83	85			UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
								5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		91	92	93	94	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	UPT BPOM
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	78,14	81	84	86	89			UPT BPOM
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	86	87	88	89	90	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87,67	88,8	89,9	91	92,1			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	71	74	77	80	83		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01			UPT BPOM
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	89,5	90	90,5	91	92		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	91,74	91,75	92	92,5	93			UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT									
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95		1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	98,87	99	99,5	100	100			UPT BPOM
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	63,76	60	65	70	75			UPT BPOM
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	100	100	100	100	100			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	50	55	60	65	70	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	20,62	55	55	60	65	Pro PN	UPT BPOM	
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	60	63	66	68	71	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	61,80	63	66	68	71	Pro PN	UPT BPOM	
								6	Indeks Pelayanan Publik	3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	Pro PN	UPT BPOM	
								7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		-	77	79	81		Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	UPT BPOM
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT							Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	93,79	94	95,4	96,8	98,3		UPT BPOM	
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	20	40	62	82	104	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	16	40	59	78	97	Pro PN	UPT BPOM	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	6	12	19	25	32		3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	4	12	19	25	32	Pro PN		UPT BPOM
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	3	6	9	13	17		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	2	6	9	13	17	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,88	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,81	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	52	58	64	69	75		1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	56,74	58	64	69	75	Pro PN		UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal									
	1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	89	93	94	95		1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9			
	2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	85	90	91	92		2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								
	1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91		1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,29	84,5	84,75	85	85,25		
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	70,50	77	82	87	92		UPT BPOM dan PPPOMN
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	2,5	2	2,25	2,5	3		UPT BPOM
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97		1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9	99,0		
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (100%)	Efisien (93%)	-	-	-		

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Palembang yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Palembang serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang.
- b. BBPOM di Palembang selaku unit pelaksana teknis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Palembang tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Palembang sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Palembang agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang. BBPOM di Palembang sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Palembang dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Palembang ini, diharapkan BBPOM di Palembang terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR PR.04.01.6A.6A51.12.21.260 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022;

Peraturan ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Penyusunan ...

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas

Obat ...

Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2022.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan ...

-5-

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI PALEMBANG NOMOR
 PR.04.01.6A.6A51.12.21.260 TAHUN
 2021 TENTANG RENCANA KINERJA
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
 PALEMBANG TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan	Indeks kepuasan pelaku usaha	89,9

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,12
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik	4,20

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	9
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83,9
		Nilai AKIP UPT	80,9
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,75
10	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat	82

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	dan Makanan sesuai standar GLP	
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Palembang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palembang
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BBPOM di Palembang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,12
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,5
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4,20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	59
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	9
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83,9
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80,9
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,75
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,7

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
30,567,108,000.00

Palembang, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Palembang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	487.649.000,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	423.392.000,00	42.339.200,00	42.339.200,00	63.508.800,00	63.508.800,00	211.696.000,00	50,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT	551.906.000,00	55.190.600,00	55.190.600,00	82.785.900,00	82.785.900,00	275.953.000,00	50,00 (%)				
Total				97.529.800,00	97.529.800,00	146.294.700,00	146.294.700,00	487.649.000,00						
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			88	88	88	88	88	88	88	88	88	255.042.500,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	193.235.000,00	19.323.500,00	19.323.500,00	28.985.250,00	28.985.250,00	96.617.500,00	50,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	316.850.000,00	31.685.000,00	31.685.000,00	47.527.500,00	47.527.500,00	158.425.000,00	50,00 (%)				
Total				51.008.500,00	51.008.500,00	76.512.750,00	76.512.750,00	255.042.500,00						
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			96	96	96	96	96	96	96	96	96	487.649.000,00	

No.	Indikator Kinerja			Target									Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget			
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	423.392.000,00	42.339.200,00	42.339.200,00	63.508.800,00	63.508.800,00	211.696.000,00	50,00 (%)			
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT	551.906.000,00	55.190.600,00	55.190.600,00	82.785.900,00	82.785.900,00	275.953.000,00	50,00 (%)			
Total				97.529.800,00	97.529.800,00	146.294.700,00	146.294.700,00	487.649.000,00					
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			82	82	82	82	82	82	82	82	255.042.500,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget			
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	193.235.000,00	19.323.500,00	19.323.500,00	28.985.250,00	28.985.250,00	96.617.500,00	50,00 (%)			
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	316.850.000,00	31.685.000,00	31.685.000,00	47.527.500,00	47.527.500,00	158.425.000,00	50,00 (%)			
Total				51.008.500,00	51.008.500,00	76.512.750,00	76.512.750,00	255.042.500,00					
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat			92	92	92	92	92	92	92	92	55.134.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget			
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN SAMPEL	26.884.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	26.884.000,00	100,00 (%)			
2.	BBPOM di Palembang	A	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL PANGAN FORTIFIKASI	28.250.000,00	7.062.500,00	7.062.500,00	7.062.500,00	7.062.500,00	28.250.000,00	100,00 (%)			
Total				13.783.500,00	13.783.500,00	13.783.500,00	13.783.500,00	55.134.000,00					
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu									84	135.000.000,00		

No.	Indikator Kinerja			Target									Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget			
1.	BBPOM di Palembang	A	SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OMKABA	127.160.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	127.160.000,00	100,00 (%)			
2.	BBPOM di Palembang	B	AUDIENSI PIMPINAN KE KABUPATEN KOTA	7.840.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	7.840.000,00	100,00 (%)			
Total				33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	135.000.000,00					
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan								89,9	167.878.600,00			

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PEMETAAN KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD, PASAR AMAN)	95.349.000,00	4.767.450,00	4.767.450,00	4.767.450,00	4.767.450,00	19.069.800,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH	103.800.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	5.190.000,00	20.760.000,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	C	PELATIHAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS)	87.440.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	17.488.000,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	D	AUDIT DAN PENDAMPINGAN PIAGAM BINTANG KANTIN SEKOLAH (TAHAP II)	83.840.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	16.768.000,00	20,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	F	OPERASIONAL MOBLING UMUM	123.350.000,00	6.167.500,00	6.167.500,00	6.167.500,00	6.167.500,00	24.670.000,00	20,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	G	FOOD SECURITY	71.000.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	14.200.000,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN PAKET EDUKASI	112.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	22.400.000,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP KEAMANAN PANGAN NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHASAN TEKNIS INTERVENSI KEAMANAN PANGAN DI DESA, SEKOLAH DAN PASAR	14.052.000,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	2.810.400,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	A	ADVOKASI LINTAS SEKTOR TERPADU PJAS, GKPD, DAN PASAR AMAN	93.122.000,00	4.656.100,00	4.656.100,00	4.656.100,00	4.656.100,00	18.624.400,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	B	AUDIENSI LINTAS SEKTOR KEGIATAN TERPADU	5.440.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	1.088.000,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	50.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	20,00 (%)				
Total				41.969.650,00	41.969.650,00	41.969.650,00	41.969.650,00	167.878.600,00						
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan								77,12	198.105.000,00				
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS DESA	232.225.000,00	11.611.250,00	11.611.250,00	11.611.250,00	11.611.250,00	46.445.000,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	FASILITAS PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN	21.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)	273.311.000,00	13.665.550,00	13.665.550,00	13.665.550,00	13.665.550,00	54.662.200,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	B	PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA GAP ASSEMENT	27.180.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	5.436.000,00	20,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	C	TIM KEAMANAN PANGAN DESA	45.150.000,00	2.257.500,00	2.257.500,00	2.257.500,00	2.257.500,00	9.030.000,00	20,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	A	OPERASIONAL MOBLING DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMAMAMANAN PANGAN POST INTERVENSI	71.120.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	14.224.000,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	A	PENGAWALAN DI DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2020	77.220.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	15.444.000,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD DAN PASAR AMAN)	104.750.000,00	5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00	20.950.000,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	C	LOMBA PANGAN DESA AMAN	22.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	4.500.000,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	D	PEMETAAN DISTRIBUSI KERACUNAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA	12.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	E	PEMBERDAYAAN UMKM UMUM MENDORONG PIRT MENJADI MD	17.550.000,00	877.500,00	877.500,00	877.500,00	877.500,00	3.510.000,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	F	FGD KOORDINASI DAN PEMANTAPAN TAHUBJA DENGAN LINTAS SEKTOR	24.890.000,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00	1.244.500,00	4.978.000,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	G	PELATIHAN AUDITOR PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS) BAGI PETUGAS	11.112.000,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	2.222.400,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	Automatic Adjustment (Blokir)	43.177.000,00	2.158.850,00	2.158.850,00	2.158.850,00	2.158.850,00	8.635.400,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	H	Automatic Adjustment (Blokir)	7.340.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	1.468.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
Total				49.526.250,00	49.526.250,00	49.526.250,00	49.526.250,00	198.105.000,00						
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM								92	55.511.800,00				
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMTEK PETUGAS PASAR	53.360.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	10.672.000,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	51.249.000,00	2.562.450,00	2.562.450,00	2.562.450,00	2.562.450,00	10.249.800,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	70.600.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	14.120.000,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	A	LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PENGAWASAN PANGAN BULAN PUASA	102.350.000,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	5.117.500,00	20.470.000,00	20,00 (%)				
Total				13.877.950,00	13.877.950,00	13.877.950,00	13.877.950,00	55.511.800,00						
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			25	75	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	57.300.200,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA	9.730.000,00	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00	973.000,00	10,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK (Lanjutan/ Topik Khusus)	4.036.000,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	403.600,00	10,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	C	PEER INSPECTION CPOB	29.384.000,00	0,00	1.469.200,00	0,00	1.469.200,00	2.938.400,00	10,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKINS INSPEKTUR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (Dasar)	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMTEK CPOTB TOPIK KHUSUS	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	10.888.000,00	0,00	544.400,00	0,00	544.400,00	1.088.800,00	10,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN OMKABA	10.650.000,00	0,00	532.500,00	0,00	532.500,00	1.065.000,00	10,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBA	750.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00	10,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	8.072.000,00	0,00	403.600,00	0,00	403.600,00	807.200,00	10,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	52.614.000,00	0,00	2.630.700,00	0,00	2.630.700,00	5.261.400,00	10,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	273.462.000,00	0,00	13.673.100,00	0,00	13.673.100,00	27.346.200,00	10,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	B	JOIN INSPECTION CPOTB	13.336.000,00	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00	1.333.600,00	10,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	11.388.000,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00	1.138.800,00	10,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA DI PROVINSI DAN KAB/KOTA	32.620.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	3.262.000,00	10,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	E	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	52.240.000,00	0,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	5.224.000,00	10,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	F	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OBAT PALSU,TINDAK LANJUT PUBLIC WARNING (KASUS)	55.240.000,00	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	5.524.000,00	10,00 (%)				
Total				0,00	28.650.100,00	0,00	28.650.100,00	57.300.200,00						
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			25	50	65	65	65	65	65	65	65	57.300.200,00	

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA	9.730.000,00	0,00	486.500,00	0,00	486.500,00	973.000,00	10,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK (Lanjutan/ Topik Khusus)	4.036.000,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	403.600,00	10,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	C	PEER INSPECTION CPOB	29.384.000,00	0,00	1.469.200,00	0,00	1.469.200,00	2.938.400,00	10,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (Dasar)	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMTEK CPOTB TOPIK KHUSUS	4.296.000,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00	429.600,00	10,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	10.888.000,00	0,00	544.400,00	0,00	544.400,00	1.088.800,00	10,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN OMKABA	10.650.000,00	0,00	532.500,00	0,00	532.500,00	1.065.000,00	10,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBA	750.000,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	75.000,00	10,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	8.072.000,00	0,00	403.600,00	0,00	403.600,00	807.200,00	10,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	52.614.000,00	0,00	2.630.700,00	0,00	2.630.700,00	5.261.400,00	10,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	273.462.000,00	0,00	13.673.100,00	0,00	13.673.100,00	27.346.200,00	10,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	B	JOIN INSPECTION CPOTB	13.336.000,00	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00	1.333.600,00	10,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	11.388.000,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00	1.138.800,00	10,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA DI PROVINSI DAN KAB/KOTA	32.620.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	3.262.000,00	10,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	E	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	52.240.000,00	0,00	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	5.224.000,00	10,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
16.	BBPOM di Palembang	F	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OBAT PALSU,TINDAK LANJUT PUBLIC WARNING (KASUS)	55.240.000,00	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	5.524.000,00	10,00 (%)				
Total				0,00	28.650.100,00	0,00	28.650.100,00	57.300.200,00						
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	267.200.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENERBITAN REKOMENDASI DALAM RANGKA PERIJINAN OBAT DAN MAKANAN	110.056.000,00	22.011.200,00	22.011.200,00	22.011.200,00	22.011.200,00	88.044.800,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENDAMPINGAN UMKM DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BBPOM	84.200.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	67.360.000,00	80,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	B	WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR DI BBPOM	6.216.000,00	1.243.200,00	1.243.200,00	1.243.200,00	1.243.200,00	4.972.800,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	C	FGD LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	25.600.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	20.480.000,00	80,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS dan PELAYANAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN	59.900.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	47.920.000,00	80,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP BIDANG PEMERIKSAAN	12.174.000,00	2.434.800,00	2.434.800,00	2.434.800,00	2.434.800,00	9.739.200,00	80,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK EKSPOR IMPOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	8.592.000,00	1.718.400,00	1.718.400,00	1.718.400,00	1.718.400,00	6.873.600,00	80,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	G	PENINGKATAN KEMANDIRIAN BALAI DAN PELAKU USAHA DALAM RANGKA MANDATORY SERTIFIKASI CDOB	9.190.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	7.352.000,00	80,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	H	Sosialisasi Regulasi Di Bidang Obat (Jawa Barat)	4.036.000,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	3.228.800,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
10.	BBPOM di Palembang	I	PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI CPOTB PADA SARANA PRODUKSI OBAT	600.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00	80,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	J	BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP BAGI PETUGAS BALAI/LOKA POM	4.036.000,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	3.228.800,00	80,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	K	WORKSHOP PENGAWALAN INOVASI PANGAN LOKAL SPESIFIK DAERAH TAHUN 2022	4.296.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	80,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	L	Automatic Adjustment (Pemblokiran)	5.104.000,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	4.083.200,00	80,00 (%)				
Total				66.800.000,00	66.800.000,00	66.800.000,00	66.800.000,00	267.200.000,00						
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			60	60	60	60	60	60	60	60	60	83.490.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	83.490.000,00	20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	83.490.000,00	100,00 (%)				
Total				20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	20.872.500,00	83.490.000,00						
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			66	66	66	66	66	66	66	66	66	458.401.600,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA	9.730.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00	1.946.000,00	7.784.000,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR DI BIDANG OT DAN SK (Lanjutan/ Topik Khusus)	4.036.000,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	807.200,00	3.228.800,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
3.	BBPOM di Palembang	C	PEER INSPECTION CPOB	29.384.000,00	5.876.800,00	5.876.800,00	5.876.800,00	5.876.800,00	23.507.200,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKINS INSPEKTUR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN (Dasar)	4.296.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	80,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMTEK CPOTB TOPIK KHUSUS	4.296.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	80,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	10.888.000,00	2.177.600,00	2.177.600,00	2.177.600,00	2.177.600,00	8.710.400,00	80,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN OMKABA	10.650.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	8.520.000,00	80,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBA	750.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	80,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	8.072.000,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.614.400,00	6.457.600,00	80,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK (Jakarta)	52.614.000,00	10.522.800,00	10.522.800,00	10.522.800,00	10.522.800,00	42.091.200,00	80,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	A	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OMKA OLEH PETUGAS BALAI DI PROP SUMSEL	273.462.000,00	54.692.400,00	54.692.400,00	54.692.400,00	54.692.400,00	218.769.600,00	80,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	B	JOIN INSPECTION CPOTB	13.336.000,00	2.667.200,00	2.667.200,00	2.667.200,00	2.667.200,00	10.668.800,00	80,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	C	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	11.388.000,00	2.277.600,00	2.277.600,00	2.277.600,00	2.277.600,00	9.110.400,00	80,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	PENGAWASAN TERPADU BAHAN BERBAHAYA DI PROVINSI DAN KAB/KOTA	32.620.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	6.524.000,00	26.096.000,00	80,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	E	PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	52.240.000,00	10.448.000,00	10.448.000,00	10.448.000,00	10.448.000,00	41.792.000,00	80,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	F	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DALAM RANGKA DETEKSI DINI OBAT PALSU, TINDAK LANJUT PUBLIC WARNING (KASUS)	55.240.000,00	11.048.000,00	11.048.000,00	11.048.000,00	11.048.000,00	44.192.000,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
Total				114.600.400,00	114.600.400,00	114.600.400,00	114.600.400,00	458.401.600,00						
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM									4,20	66.800.000,00			
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	PENERBITAN REKOMENDASI DALAM RANGKA PERIJINAN OBAT DAN MAKANAN	110.056.000,00	5.502.800,00	5.502.800,00	5.502.800,00	5.502.800,00	22.011.200,00	20,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENDAMPINGAN UMKM DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BBPOM	84.200.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	16.840.000,00	20,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	B	WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR DI BBPOM	6.216.000,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	1.243.200,00	20,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	C	FGD LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN	25.600.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	5.120.000,00	20,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS dan PELAYANAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN	59.900.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	11.980.000,00	20,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP BIDANG PEMERIKSAAN	12.174.000,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00	2.434.800,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	F	FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK EKSPOR IMPOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	8.592.000,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00	429.600,00	1.718.400,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	G	PENINGKATAN KEMANDIRIAN BALAI DAN PELAKU USAHA DALAM RANGKA MANDATORY SERTIFIKASI CDOB	9.190.000,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00	1.838.000,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	H	Sosialisasi Regulasi Di Bidang Obat (Jawa Barat)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	I	PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI CPOTB PADA SARANA PRODUKSI OBAT	600.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target									Anggaran			
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09		B10	B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
11.	BBPOM di Palembang	J	BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP BAGI PETUGAS BALAI/LOKA POM	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)						
12.	BBPOM di Palembang	K	WORKSHOP PENGAWALAN INOVASI PANGAN LOKAL SPESIFIK DAERAH TAHUN 2022	4.296.000,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	859.200,00	20,00 (%)						
13.	BBPOM di Palembang	L	Automatic Adjustment (Pemblokiran)	5.104.000,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	1.020.800,00	20,00 (%)						
Total				16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	16.700.000,00	66.800.000,00								
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan 10 dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik			15	25	35	45	50	55	65	75	85	90	77	101.431.000,00	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN CPPOB BAGI UMKM	20.451.000,00	5.112.750,00	5.112.750,00	5.112.750,00	5.112.750,00	20.451.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	PENGUATAN PENDAMPINGAN UMKM MENUJU NIE	42.100.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00	42.100.000,00	100,00 (%)						
3.	BBPOM di Palembang	C	Pendampingan UMKM OT	8.740.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	8.740.000,00	100,00 (%)						
4.	BBPOM di Palembang	D	Pendampingan UMKM KOSMETIK	8.740.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	8.740.000,00	100,00 (%)						
5.	BBPOM di Palembang	A	Penilaian GAP dan kondisi sarana UMKM OT	12.660.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00	12.660.000,00	100,00 (%)						
6.	BBPOM di Palembang	B	Penilaian GAP dan kondisi sarana UMKM KOSMETIK	8.740.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	8.740.000,00	100,00 (%)						
Total				25.357.750,00	25.357.750,00	25.357.750,00	25.357.750,00	101.431.000,00								
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	95,4	1.832.040.000,00

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI	203.440.000,00	50.860.000,00	50.860.000,00	50.860.000,00	50.860.000,00	203.440.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN	1.628.600.000,00	407.150.000,00	407.150.000,00	407.150.000,00	407.150.000,00	1.628.600.000,00	100,00 (%)						
Total				458.010.000,00	458.010.000,00	458.010.000,00	458.010.000,00	1.832.040.000,00								
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	59	671.514.400,00

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	PEMETAAN KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD, PASAR AMAN)	95.349.000,00	19.069.800,00	19.069.800,00	19.069.800,00	19.069.800,00	76.279.200,00	80,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	BIMTEK KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH	103.800.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00	83.040.000,00	80,00 (%)						
3.	BBPOM di Palembang	C	PELATIHAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS)	87.440.000,00	17.488.000,00	17.488.000,00	17.488.000,00	17.488.000,00	69.952.000,00	80,00 (%)						
4.	BBPOM di Palembang	D	AUDIT DAN PENDAMPINGAN PIAGAM BINTANG KANTIN SEKOLAH (TAHAP II)	83.840.000,00	16.768.000,00	16.768.000,00	16.768.000,00	16.768.000,00	67.072.000,00	80,00 (%)						
5.	BBPOM di Palembang	F	OPERASIONAL MOBLING UMUM	123.350.000,00	24.670.000,00	24.670.000,00	24.670.000,00	24.670.000,00	98.680.000,00	80,00 (%)						
6.	BBPOM di Palembang	G	FOOD SECURITY	71.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	56.800.000,00	80,00 (%)						
7.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN PAKET EDUKASI	112.000.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	89.600.000,00	80,00 (%)						
8.	BBPOM di Palembang	E	WORKSHOP KEAMANAN PANGAN NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHASAN TEKNIS INTERVENSI KEAMANAN PANGAN DI DESA, SEKOLAH DAN PASAR	14.052.000,00	2.810.400,00	2.810.400,00	2.810.400,00	2.810.400,00	11.241.600,00	80,00 (%)						
9.	BBPOM di Palembang	A	ADVOKASI LINTAS SEKTOR TERPADU PJAS, GKPD, DAN PASAR AMAN	93.122.000,00	18.624.400,00	18.624.400,00	18.624.400,00	18.624.400,00	74.497.600,00	80,00 (%)						
10.	BBPOM di Palembang	B	AUDIENSI LINTAS SEKTOR KEGIATAN TERPADU	5.440.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00	4.352.000,00	80,00 (%)						
11.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	80,00 (%)						
Total				167.878.600,00	167.878.600,00	167.878.600,00	167.878.600,00	671.514.400,00								
19.	Jumlah desa pangan aman			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	19	792.420.000,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMBINGAN TEKNIS KOMUNITAS DESA	232.225.000,00	46.445.000,00	46.445.000,00	46.445.000,00	46.445.000,00	185.780.000,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	B	FASILITAS PENERAPAN KEAMANAN PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN	21.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00	80,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)	273.311.000,00	54.662.200,00	54.662.200,00	54.662.200,00	54.662.200,00	218.648.800,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	B	PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA GAP ASSEMENT	27.180.000,00	5.436.000,00	5.436.000,00	5.436.000,00	5.436.000,00	21.744.000,00	80,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	C	TIM KEAMANAN PANGAN DESA	45.150.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	36.120.000,00	80,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	A	OPERASIONAL MOBILING DALAM RANGKA INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMAMAMAN PANGAN POST INTERVENSI	71.120.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	14.224.000,00	56.896.000,00	80,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	A	PENGAWALAN DI DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2020	77.220.000,00	15.444.000,00	15.444.000,00	15.444.000,00	15.444.000,00	61.776.000,00	80,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN TERPADU (PJAS, GKPD DAN PASAR AMAN)	104.750.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00	83.800.000,00	80,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	C	LOMBA PANGAN DESA AMAN	22.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	80,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	D	PEMETAAN DISTRIBUSI KERACUNAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA	12.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00	80,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	E	PEMBERDAYAAN UMKM UMUM MENDORONG PIRT MENJADI MD	17.550.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	14.040.000,00	80,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	F	FGD KOORDINASI DAN PEMANTAPAN TAHUBJA DENGAN LINTAS SEKTOR	24.890.000,00	4.978.000,00	4.978.000,00	4.978.000,00	4.978.000,00	19.912.000,00	80,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	G	PELATIHAN AUDITOR PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH (PBKPKS) BAGI PETUGAS	11.112.000,00	2.222.400,00	2.222.400,00	2.222.400,00	2.222.400,00	8.889.600,00	80,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	D	Automatic Adjustment (Blokir)	43.177.000,00	8.635.400,00	8.635.400,00	8.635.400,00	8.635.400,00	34.541.600,00	80,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
15.	BBPOM di Palembang	H	Automatic Adjustment (Blokir)	7.340.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	5.872.000,00	80,00 (%)						
Total				198.105.000,00	198.105.000,00	198.105.000,00	198.105.000,00	792.420.000,00								
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1.544.400.000,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	10.816.000,00	1.622.400,00	1.622.400,00	1.622.400,00	1.622.400,00	6.489.600,00	60,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI POM (OBAT/NAPZA, OT/SK, KOSMETIK, PANGAN, MIKROBIOLOGI)	35.272.000,00	5.290.800,00	5.290.800,00	5.290.800,00	5.290.800,00	21.163.200,00	60,00 (%)						
3.	BBPOM di Palembang	C	BIMBINGAN TEKNIS DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES	8.818.000,00	1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00	5.290.800,00	60,00 (%)						
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS SEKSI KIMIA (LAB PANGAN/OBAT/OT-SK/KOSMETIK)	39.704.000,00	5.955.600,00	5.955.600,00	5.955.600,00	5.955.600,00	23.822.400,00	60,00 (%)						
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMBINGAN TEKNIS MIKROBIOLOGI	19.612.000,00	2.941.800,00	2.941.800,00	2.941.800,00	2.941.800,00	11.767.200,00	60,00 (%)						
6.	BBPOM di Palembang	F	MAGANG DI PPOMN ATAU LAB UNGGULAN (PANGAN, TERANOKOKO, MIKROBIOLOGI)	9.716.000,00	1.457.400,00	1.457.400,00	1.457.400,00	1.457.400,00	5.829.600,00	60,00 (%)						
7.	BBPOM di Palembang	A	VALIDASI/REVALIDASI/VERIFIKASI METODE ANALISIS DAN SIDANG PLENO	20.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	60,00 (%)						
8.	BBPOM di Palembang	B	UJI PROFISIENSI / UJI KOLABORASI / UJI PETIK	36.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	60,00 (%)						
9.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN BAHAN KIMIA KHUSUS	60.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00	60,00 (%)						
10.	BBPOM di Palembang	B	PENGADAAN PENUNJANG LAB DAN K3	229.000.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	137.400.000,00	60,00 (%)						

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
11.	BBPOM di Palembang	C	PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKRO PENGUJIAN PIHAK KE 3	200.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00	60,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	D	PENGADAAN SUKU CADANG	974.001.000,00	146.100.150,00	146.100.150,00	146.100.150,00	146.100.150,00	584.400.600,00	60,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	E	PENGADAAN BAKU PEMBANDING	60.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00	60,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	F	PENGADAAN GLASSWARE	106.668.000,00	16.000.200,00	16.000.200,00	16.000.200,00	16.000.200,00	64.000.800,00	60,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	G	PENGADAAN REAGENSIA, PENUNJANG LAB DAN K3 LAB PCR	315.000.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	189.000.000,00	60,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI LAB RUJUKAN UJI STERILITAS	30.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	60,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	135.000.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	81.000.000,00	60,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	A	PERTEMUAN TEKNIS LABORATORIUM KAN	4.878.000,00	731.700,00	731.700,00	731.700,00	731.700,00	2.926.800,00	60,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN I)	5.608.000,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	3.364.800,00	60,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	C	PENGELOLAAN LIMBAH DAN RETAIN SAMPEL	31.000.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	18.600.000,00	60,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	D	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN II dan III)	5.608.000,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00	3.364.800,00	60,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	E	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	234.419.000,00	35.162.850,00	35.162.850,00	35.162.850,00	35.162.850,00	140.651.400,00	60,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	F	REASESMEN BB/BPOM DAN SOSIALISASI PEDOMAN GLP	2.880.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	1.728.000,00	60,00 (%)				
Total				386.100.000,00	386.100.000,00	386.100.000,00	386.100.000,00	1.544.400.000,00						

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1.029.600.000,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	PELATIHAN EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU	10.816.000,00	1.081.600,00	1.081.600,00	1.081.600,00	1.081.600,00	4.326.400,00	40,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI POM (OBAT/NAPZA, OT/SK, KOSMETIK, PANGAN, MIKROBIOLOGI)	35.272.000,00	3.527.200,00	3.527.200,00	3.527.200,00	3.527.200,00	14.108.800,00	40,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	BIMBINGAN TEKNIS DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES	8.818.000,00	881.800,00	881.800,00	881.800,00	881.800,00	3.527.200,00	40,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	BIMBINGAN TEKNIS SEKSI KIMIA (LAB PANGAN/OBAT/OT-SK/KOSMETIK)	39.704.000,00	3.970.400,00	3.970.400,00	3.970.400,00	3.970.400,00	15.881.600,00	40,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	BIMBINGAN TEKNIS MIKROBIOLOGI	19.612.000,00	1.961.200,00	1.961.200,00	1.961.200,00	1.961.200,00	7.844.800,00	40,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	MAGANG DI PPOMN ATAU LAB UNGGULAN (PANGAN, TERANOKOKO, MIKROBIOLOGI)	9.716.000,00	971.600,00	971.600,00	971.600,00	971.600,00	3.886.400,00	40,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	A	VALIDASI/REVALIDASI/VERIFIKASI METODE ANALISIS DAN SIDANG PLENO	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	40,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	B	UJI PROFISIENSI / UJI KOLABORASI / UJI PETIK	36.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00	40,00 (%)
9.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN BAHAN KIMIA KHUSUS	60.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	40,00 (%)
10.	BBPOM di Palembang	B	PENGADAAN PENUNJANG LAB DAN K3	229.000.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	91.600.000,00	40,00 (%)
11.	BBPOM di Palembang	C	PENGADAAN REAGEN DAN MEDIA MIKRO PENGUJIAN PIHAK KE 3	200.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	40,00 (%)
12.	BBPOM di Palembang	D	PENGADAAN SUKU CADANG	974.001.000,00	97.400.100,00	97.400.100,00	97.400.100,00	97.400.100,00	389.600.400,00	40,00 (%)
13.	BBPOM di Palembang	E	PENGADAAN BAKU PEMBANDING	60.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	40,00 (%)
14.	BBPOM di Palembang	F	PENGADAAN GLASSWARE	106.668.000,00	10.666.800,00	10.666.800,00	10.666.800,00	10.666.800,00	42.667.200,00	40,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
15.	BBPOM di Palembang	G	PENGADAAN REAGENSIA, PENUNJANG LAB DAN K3 LAB PCR	315.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	126.000.000,00	40,00 (%)						
16.	BBPOM di Palembang	H	PENGADAAN MEDIA MIKROBIOLOGI LAB RUJUKAN UJI STERILITAS	30.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	40,00 (%)						
17.	BBPOM di Palembang	I	Automatic Adjustment (Blokir)	135.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	54.000.000,00	40,00 (%)						
18.	BBPOM di Palembang	A	PERTEMUAN TEKNIS LABORATORIUM KAN	4.878.000,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	1.951.200,00	40,00 (%)						
19.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN I)	5.608.000,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	2.243.200,00	40,00 (%)						
20.	BBPOM di Palembang	C	PENGLOLAAN LIMBAH DAN RETAIN SAMPEL	31.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	12.400.000,00	40,00 (%)						
21.	BBPOM di Palembang	D	RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING (KEDEPUTIAN II dan III)	5.608.000,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	560.800,00	2.243.200,00	40,00 (%)						
22.	BBPOM di Palembang	E	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM	234.419.000,00	23.441.900,00	23.441.900,00	23.441.900,00	23.441.900,00	93.767.600,00	40,00 (%)						
23.	BBPOM di Palembang	F	REASESMEN BB/BPOM DAN SOSIALISASI PEDOMAN GLP	2.880.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	1.152.000,00	40,00 (%)						
Total				257.400.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00	25.740.000,00	1.029.600.000,00							
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			12,5	21,39	24	32,35	33,94	44,56	49,82	53,77	60,61	60,99	62,71	64	850.009.000,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	3.024.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	3.024.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	A	Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	3.780.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	3.780.000,00	100,00 (%)						

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
3.	BBPOM di Palembang	B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	140.100.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	140.100.000,00	100,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	C	Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	3.024.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	3.024.000,00	100,00 (%)				
5.	BBPOM di Palembang	A	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	3.024.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	3.024.000,00	100,00 (%)				
6.	BBPOM di Palembang	A	Operasi Penindakan	135.342.000,00	33.835.500,00	33.835.500,00	33.835.500,00	33.835.500,00	135.342.000,00	100,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	B	Perlengkapan dan Penahanan	40.860.000,00	10.215.000,00	10.215.000,00	10.215.000,00	10.215.000,00	40.860.000,00	100,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	A	Pemberkasan	163.512.000,00	40.878.000,00	40.878.000,00	40.878.000,00	40.878.000,00	163.512.000,00	100,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	15.024.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	3.756.000,00	15.024.000,00	100,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	C	Gelar Perkara	5.112.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	5.112.000,00	100,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	D	Bantuan Hukum	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	100,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	47.160.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	47.160.000,00	100,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	A	Perencanaan Penyusunan Analisis	1.360.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.360.000,00	100,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	B	Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	33.184.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00	33.184.000,00	100,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	C	FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	3.720.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	3.720.000,00	100,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	A	Rapat Perencanaan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan	1.360.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.360.000,00	100,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	B	Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5.050.000,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	5.050.000,00	100,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
18.	BBPOM di Palembang	C	Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	31.394.000,00	7.848.500,00	7.848.500,00	7.848.500,00	7.848.500,00	31.394.000,00	100,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	D	Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5.440.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	5.440.000,00	100,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	E	Penyusunan Laporan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	1.680.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.680.000,00	100,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	A	Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	30.240.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	30.240.000,00	100,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	B	Bimtek Aplikasi Dashboard Penindakan (Peta Rawan Kasus)	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	C	Konsultasi Nasional Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	D	Pembentukan Petugas Analisis Pencegahan Kejahatan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	E	Pembentukan Petugas Penggalangan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	F	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Siber Obat dan Makanan	20.640.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	20.640.000,00	100,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	G	Pembentukan Petugas Analisis Siber Obat dan Makanan	28.080.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	28.080.000,00	100,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	H	Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	I	Forum Koordinasi Intelijen	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	J	Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	K	Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS Badan POM RI	5.860.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	5.860.000,00	100,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	L	Pembentukan Petugas Intelijen BPOM	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No. Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget					
33.	BBPOM di Palembang	M	Workshop Intelijen Strategis	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	O	Perkuatan Petugas Intelijen BPOM	5.360.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00	100,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	P	Pengadaan Alat Taktis Intelijen	8.935.000,00	2.233.750,00	2.233.750,00	2.233.750,00	2.233.750,00	8.935.000,00	100,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	Q	Pemusnahan Barang bukti, Saksi Pemusnahan, Saksi Sidang dan Keterangan Ahli	18.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00	100,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	R	Konsultasi Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM BBPOM di Bidang Hukum	24.344.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00	6.086.000,00	24.344.000,00	100,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	N	Bimtek Sistem Monitoring Obat dan Makanan kepada UPT Badan POM	5.160.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	100,00 (%)				
Total				212.502.250,00	212.502.250,00	212.502.250,00	212.502.250,00	850.009.000,00						

23. Indeks RB UPT

83,9

3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)				
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)				
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)				
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)				
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)				
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)				
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)				
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)				
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)				
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No. Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)					
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)				
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)				
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)				
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						

24. Nilai AKIP UPT

80,9

3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)				
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/ TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)				
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)				
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)				
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)				
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)				
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)				
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)				
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)				
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)				
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						

25. Indeks Profesionalitas ASN UPT

84,75

3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No. Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)					
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)					
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)					
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)					
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)					
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)					
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)					
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)					
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)					
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)					
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)					
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)					
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP								82	2.780.955.000,00				

No.	Indikator Kinerja			Target									Anggaran			
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09		B10	B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Laboratorium BBPOM di Palembang	2.483.388.000,00	620.847.000,00	620.847.000,00	620.847.000,00	620.847.000,00	2.483.388.000,00	100,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	Pengadaan Penambah Nilai Alat Laboratorium BBPOM di Palembang	297.567.000,00	74.391.750,00	74.391.750,00	74.391.750,00	74.391.750,00	297.567.000,00	100,00 (%)						
Total				695.238.750,00	695.238.750,00	695.238.750,00	695.238.750,00	2.780.955.000,00								
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2	2	2,1	2,1	2,2	2,25	3.531.037.400,00
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget						
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)						
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)						
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNES QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)						
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)						
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)						
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)						
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)						
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)						
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)						

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)				
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)				
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA B POM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)				
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)				
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)				
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)				
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)				
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)				
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)				
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)				
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)				
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)				
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00						

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	90	98,7	3.531.037.400,00

No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget
1.	BBPOM di Palembang	A	KONSULTASI KE PUSAT DAN ANTAR BALAI	74.760.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	3.738.000,00	14.952.000,00	20,00 (%)
2.	BBPOM di Palembang	B	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN REFORMASI BIROKRASI	5.086.000,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	254.300,00	1.017.200,00	20,00 (%)
3.	BBPOM di Palembang	C	AWARNESS QMS ISO 9001:2015 BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
4.	BBPOM di Palembang	D	INTERNALISASI REFORMASI BIROKRASI BPOM	4.776.000,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	955.200,00	20,00 (%)
5.	BBPOM di Palembang	E	PENGGANDAAN POK REVISI DIPA	7.540.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	1.508.000,00	20,00 (%)
6.	BBPOM di Palembang	F	PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	16.012.000,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	3.202.400,00	20,00 (%)
7.	BBPOM di Palembang	G	PERJALANAN MONITORING KEPALA BALAI KE WILAYAH KERJA	13.700.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	2.740.000,00	20,00 (%)
8.	BBPOM di Palembang	H	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM	28.776.000,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00	5.755.200,00	20,00 (%)
9.	BBPOM di Palembang	I	PENYUSUNAN TEMPLATE SKP JABATAN PFM	4.136.000,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	827.200,00	20,00 (%)
10.	BBPOM di Palembang	J	SOSIALISASI PENATAUSAHAAN BMN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)
11.	BBPOM di Palembang	K	PEMUTAKHIRAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER II 2021	9.792.000,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	489.600,00	1.958.400,00	20,00 (%)
12.	BBPOM di Palembang	L	PEMUTAKHIRAN DATA BMN SEMESTER I	12.312.000,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00	2.462.400,00	20,00 (%)
13.	BBPOM di Palembang	M	FORUM KOMUNIKASI PERENCANA BPOM	17.184.000,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	859.200,00	3.436.800,00	20,00 (%)

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
14.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BALI	20.420.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	4.084.000,00	20,00 (%)				
15.	BBPOM di Palembang	B	RAPAT EVALUASI NASIONAL DI MANADO	20.510.000,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	4.102.000,00	20,00 (%)				
16.	BBPOM di Palembang	C	SINERGISME EFEKTIFITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	4.036.000,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	807.200,00	20,00 (%)				
17.	BBPOM di Palembang	D	BIMTEK SERTA UJIAN DINAS PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT	7.236.000,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	1.447.200,00	20,00 (%)				
18.	BBPOM di Palembang	E	PELATIHAN AGENT OF CHANGE REFORMASI BIROKRASI	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
19.	BBPOM di Palembang	F	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL	5.396.000,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	1.079.200,00	20,00 (%)				
20.	BBPOM di Palembang	G	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	4.173.000,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.650,00	834.600,00	20,00 (%)				
21.	BBPOM di Palembang	H	PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI/CAPACITY BUILDING	285.193.000,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	14.259.650,00	57.038.600,00	20,00 (%)				
22.	BBPOM di Palembang	I	DIKLAT TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
23.	BBPOM di Palembang	J	DIKLAT FUNGSIONAL NON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
24.	BBPOM di Palembang	K	UJI KOMPETENSI TEKNIS	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
25.	BBPOM di Palembang	L	DIKLAT PELATIHAN DASAR	24.824.000,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	1.241.200,00	4.964.800,00	20,00 (%)				
26.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN ORIENTASI CPNS	5.766.000,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	1.153.200,00	20,00 (%)				
27.	BBPOM di Palembang	N	BIMTEK PELAYANAN PUBLIK	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
28.	BBPOM di Palembang	O	DIKLAT UNTUK PEGAWAI TELADAN	7.976.000,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	1.595.200,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
29.	BBPOM di Palembang	P	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	900.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00	20,00 (%)				
30.	BBPOM di Palembang	Q	JUMLAH ATK/CETAKAN/TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	66.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00	20,00 (%)				
31.	BBPOM di Palembang	R	PELATIHAN TEKNIS PFM CALON PFM	4.176.000,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	835.200,00	20,00 (%)				
32.	BBPOM di Palembang	S	WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN POM	8.352.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	1.670.400,00	20,00 (%)				
33.	BBPOM di Palembang	T	Automatic Adjustment (Blokir)	24.280.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	4.856.000,00	20,00 (%)				
34.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	450.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	20,00 (%)				
35.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	138.219.000,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	6.910.950,00	27.643.800,00	20,00 (%)				
36.	BBPOM di Palembang	A	Pengadaan Alat Pengolah data dan Komunikasi	123.336.000,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	6.166.800,00	24.667.200,00	20,00 (%)				
37.	BBPOM di Palembang	A	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	25.800.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	5.160.000,00	20,00 (%)				
38.	BBPOM di Palembang	B	REVIU INSPEKTORAT	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
39.	BBPOM di Palembang	C	ASSISTENSI DAN PENDAMPINGAN BPK	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
40.	BBPOM di Palembang	D	SURVEILAN QMS	3.440.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	688.000,00	20,00 (%)				
41.	BBPOM di Palembang	E	PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TINDAKLANJUTNYA	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
42.	BBPOM di Palembang	F	PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL ASN SERTA UJI KOMPETENSI TEKNIS PFM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
43.	BBPOM di Palembang	G	BIMTEK DALAM RANGKA PENERAPAN SMART BPOM	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				

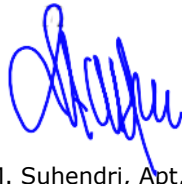
No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
44.	BBPOM di Palembang	H	INTERVENSI PEMENUHAN INDIKATOR WBK/WBBM	540.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108.000,00	20,00 (%)				
45.	BBPOM di Palembang	I	TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	12.600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	2.520.000,00	20,00 (%)				
46.	BBPOM di Palembang	J	KELANCARAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	211.656.000,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	10.582.800,00	42.331.200,00	20,00 (%)				
47.	BBPOM di Palembang	K	PEMBINAAN BBPOM/BPOM OLEH ESELON I	8.600.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.720.000,00	20,00 (%)				
48.	BBPOM di Palembang	L	PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL	360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	20,00 (%)				
49.	BBPOM di Palembang	M	PELATIHAN EKSTERNAL	60.404.000,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	3.020.200,00	12.080.800,00	20,00 (%)				
50.	BBPOM di Palembang	N	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLA PERLENGKAPAN	7.200.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00	20,00 (%)				
51.	BBPOM di Palembang	O	JUMLAH ATK/CETAKAN/ TERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINATING	24.636.000,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	1.231.800,00	4.927.200,00	20,00 (%)				
52.	BBPOM di Palembang	P	ADMINISTRASI PERKANTORAN	151.400.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	30.280.000,00	20,00 (%)				
53.	BBPOM di Palembang	Q	PERSIAPAN PENGHAPUSAN BMN	2.629.000,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	525.800,00	20,00 (%)				
54.	BBPOM di Palembang	R	ADMINISTRASI	132.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	26.400.000,00	20,00 (%)				
55.	BBPOM di Palembang	S	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	67.915.000,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	3.395.750,00	13.583.000,00	20,00 (%)				
56.	BBPOM di Palembang	T	ADMINISTRASI PENGADAAN	25.620.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	5.124.000,00	20,00 (%)				
57.	BBPOM di Palembang	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.326.590.000,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	516.329.500,00	2.065.318.000,00	20,00 (%)				
58.	BBPOM di Palembang	B	Automatic Adjustment (Blokir)	898.910.000,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	44.945.500,00	179.782.000,00	20,00 (%)				

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran		
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(% Plan Penyerapan Budget)						
59.	BBPOM di Palembang	A	PENGADAAN MAKANAN/ MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	190.080.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	38.016.000,00	20,00 (%)						
60.	BBPOM di Palembang	B	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	150.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00	20,00 (%)						
61.	BBPOM di Palembang	C	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	471.917.000,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	23.595.850,00	94.383.400,00	20,00 (%)						
62.	BBPOM di Palembang	D	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	715.623.000,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	35.781.150,00	143.124.600,00	20,00 (%)						
63.	BBPOM di Palembang	E	PERLENGKAPAN KANTOR	269.400.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	13.470.000,00	53.880.000,00	20,00 (%)						
64.	BBPOM di Palembang	F	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6	108.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	20,00 (%)						
65.	BBPOM di Palembang	G	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	6.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00 (%)						
66.	BBPOM di Palembang	H	TAGIHAN LANGGANAN DAYA DAN JASA	996.000.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	199.200.000,00	20,00 (%)						
67.	BBPOM di Palembang	I	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.173.072.000,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	58.653.600,00	234.614.400,00	20,00 (%)						
68.	BBPOM di Palembang	J	ADMINISTRASI	184.080.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	9.204.000,00	36.816.000,00	20,00 (%)						
Total				882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	882.759.350,00	3.531.037.400,00								
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	9	222.047.200,00

No.	Indikator Kinerja			Target										Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	
No.	Unit	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total	(%) Plan Penyerapan Budget				
1.	BBPOM di Palembang	A	BIMTEK PETUGAS PASAR	53.360.000,00	10.672.000,00	10.672.000,00	10.672.000,00	10.672.000,00	42.688.000,00	80,00 (%)				
2.	BBPOM di Palembang	A	PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR	51.249.000,00	10.249.800,00	10.249.800,00	10.249.800,00	10.249.800,00	40.999.200,00	80,00 (%)				
3.	BBPOM di Palembang	A	PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	70.600.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	56.480.000,00	80,00 (%)				
4.	BBPOM di Palembang	A	LABORATORIUM KELILING DALAM RANGKA PENGAWASAN PANGAN BULAN PUASA	102.350.000,00	20.470.000,00	20.470.000,00	20.470.000,00	20.470.000,00	81.880.000,00	80,00 (%)				
Total				55.511.800,00	55.511.800,00	55.511.800,00	55.511.800,00	222.047.200,00						
Total									30.567.108.000,00					

Jakarta, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Palembang



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
TRIWULAN III TAHUN 2022**

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan					
					TARGET TW III					
					SEPTEMBER	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	802	839	95,59	104,47	104,47
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM DI PALEMBANG	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00	88,00	310	344	90,12	102,40	102,40
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM DI PALEMBANG	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	289	294	98,30	102,40	102,40
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,00	65	73	89,04	108,59	108,59

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00	92,00	68	87	78,16	84,96	84,96
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM DI PALEMBANG	84,00	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di wilayah kerja BBPOM di Palembang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,90	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	-	-	-	-

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,50	80,00	-	-	87,87	109,84	88,31
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	65,00	-	-	39,45	60,69	60,69
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	347	355	97,75	97,75	97,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60	153	39,22	65,36	65,36
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	450	656	68,60	103,94	103,94

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	15	Indeks Pelayanan Publik	4,20	-	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	65,00	-	-	88,33	135,90	88,33
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	75,00	-	-	90,21	120,28	94,56
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	59,00	75,00	-	-	58,42	77,89	58,42
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	19	Jumlah desa pangan aman	19,00	75,00	-	-	72,15	96,20	72,15

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9,00	75,00	-	-	73,33	97,77	73,33
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	70,00	-	-	88,99	127,13	88,99
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	70,00	-	-	83,00	118,57	83,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64,00	60,61	-	-	55,73	91,95	87,08
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	24	Indeks RB BBPOM DI PALEMBANG	83,90		-	-	-	-	-
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Palembang yang optimal	25	Nilai AKIP BBPOM DI PALEMBANG	80,90		-	-	-	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM DI PALEMBANG	84,75		-	-	-	-	-

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00		-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM DI PALEMBANG yang optimal	2,25	2,10	-	-	2,9000	138,10	128,89
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM DI PALEMBANG	98,70	70,00	-	-	77,74	111,06	78,76

Palembang, 10 Oktober 2022

Kepala Balai Besar POM
di Palembang



Drs.Zulkifli,Apt

LAMPIRAN VI. CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	95,59	104,47%	487.649.000	411.836.948	84,45%	1,24	0,24	95 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00	90,12	102,41%	255.042.500	203.771.386	79,90%	1,28	0,28	95 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	98,30	102,40%	487.649.000	411.836.948	84,45%	1,21	0,21	95 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	89,04	108,59%	282.609.500	213.827.761	75,66%	1,44	0,44	92 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92,00	78,16	84,96%	27.567.000	10.056.375	36,48%	2,33	1,33	84 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00	-	0,00%	135.000.000	52.884.180	39,17%	0,00	-1,00	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,90	-	0,00%	167.878.600	87.856.903	52,33%	0,00	-1,00	75 %
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,12	-	0,00%	198.105.000	62.603.830	31,60%	0,00	-1,00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,00	-	0,00%	55.511.800	46.444.304	83,67%	0,00	-1,00	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	80,00	87,87	109,84%	57.300.200	33.005.390	57,60%	1,91	0,91	88 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	39,45	60,69%	57.300.200	33.005.390	57,60%	1,05	0,05	100 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	97,75	97,75%	267.200.000	85.178.375	31,88%	3,07	2,07	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	39,22	65,37%	83.490.000	77.119.375	92,37%	0,71	-0,29	75 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	68,60	103,94%	458.401.600	264.043.117	57,60%	1,80	0,80	FALSE
14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,20	-	0,00%	66.800.000	21.294.594	31,88%	0,00	-1,00	75 %
15	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	65,00	88,33	135,89%	101.431.000	35.645.888	35,14%	0,00	-1,00	75 %
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75,00	90,21	120,28%	1.832.040.000	1.599.281.828	87,30%	0,00	-1,00	75 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	75,00	58,42	77,89%	671.514.400	351.427.612	52,33%	1,49	0,49	92 %
18	Jumlah desa pangan aman	75,00	72,15	96,20%	792.420.000	250.415.321	31,60%	0,00	-1,00	75 %
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	75,00	73,33	97,77%	222.047.200	185.777.214	83,67%	1,17	0,17	100 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70,00	88,99	127,13%	1.544.400.000	1.142.587.765	73,98%	1,72	0,72	90 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70,00	83,00	118,57%	1.029.600.000	761.725.177	73,98%	1,60	0,60	FALSE
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60,61	55,73	91,95%	850.009.000	275.128.470	32,37%	2,84	1,84	75 %
23	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	83,90	-	0,00%	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%	0,00	-1,00	75 %
24	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	80,90	-	0,00%	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%	0,00	-1,00	75 %
25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	84,75	-	0,00%	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%	0,00	-1,00	75 %
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	-	0,00%	2.780.955.000	2.090.763.350	75,18%	0,00	-1,00	75 %
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,10	2,90	138,10%	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%	1,90	0,90	88 %
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	70,00	77,74	111,06%	3.711.937.400	2.702.765.316	72,81%	1,53	0,53	92 %
	TOTAL				31.471.608.000	22.221.344.079	70,61	0,00	-1,00	75 %

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A5.6A52.10.22.018

Yth. : Koordinator Kelompok Substansi Pengujian
Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia
Dari : Kepala Balai Besar POM di Palembang
Hal : Apresiasi Capaian Target Rencana Aksi TW III
Tanggal : 17 Oktober 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan III (Periode Juli s/d September 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91.50	95,59	104,47 / Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88.00	90,12	102,40 / Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00	98,30	102,40 / Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.00	89,04	108,59/ Memenuhi Ekspektasi
5.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	70,00	83,00	118,57/ Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan Apresiasi kepada Saudara, dan selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Z' followed by a horizontal line that ends in a small arrowhead pointing to the right.

Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A5.6A52.10.22.019

Yth. : Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan
Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi
Dari : Kepala Balai Besar POM di Palembang
Hal : Apresiasi Capaian Target Rencana Aksi TW III
Tanggal : 17 Oktober 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan III (Periode Juli s/d September 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	80,00	87,87	109,84 / Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	66,00	68,60	103,94 / Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan Apresiasi kepada Saudara, dan selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A5.6A52.10.22.020

Yth. : Kepala Bagian Tata Usaha
Subkoordinator Subkelompok Substansi Program & Evaluasi
Dari : Kepala Balai Besar POM di Palembang
Hal : Apresiasi Capaian Target Rencana Aksi TW III
Tanggal : 17 Oktober 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan III (Periode Juli s/d September 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi sudah Memenuhi Ekspektasi terhadap target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian/ kriteria
1.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	70	77,74	111,06 / Memenuhi Ekspektasi

Saya memberikan **Apresiasi** kepada Saudara, dan selanjutnya agar tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sehingga realisasi tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A5.6A52.10.22.021

Yth. : Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan
Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi.
Subkoordinator Subkelompok Substansi Sertifikasi

Dari : Kepala Balai Besar POM di Palembang

Hal : Peringatan Atas Capaian Target Rencana Aksi TW III

Tanggal : 17 Oktober 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan III (Periode Juli s/d September 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65,00	39,45	60,69 / Tidak Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	97,75	97,75 / Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	39,22	65,36 / Tidak Memenuhi Ekspektasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'Z' followed by a horizontal line that curves upwards and ends in a small arrowhead.

Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A5.6A52.10.22.022

Yth. : Koordinator Kelompok Substansi Infokom
Dari : Kepala Balai Besar POM di Palembang
Hal : Peringatan Atas Capaian Target Rencana Aksi TW III
Tanggal : 17 Oktober 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan III (Periode Juli s/d September 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian/ kriteria
1.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	75,00	58,42	77,89 / Tidak Memenuhi Ekspektasi
2.	Jumlah Desa Pangan Aman	75,00	72,15	96,20 / Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	75,00	73,33	97,77 / Belum Memenuhi Ekspektasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan **Peringatan** kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A5.6A52.10.22.023

Yth. : Koordinator Kelompok Substansi Pengujian
Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia
Dari : Kepala Balai Besar POM di Palembang
Hal : Peringatan Atas Capaian Target Rencana Aksi TW III
Tanggal : 17 Oktober 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan III (Periode Juli s/d September 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian/ kriteria
1.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92.00	78,16	84,96 / Belum Memenuhi Ekspektasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan Peringatan kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOTA DINAS

NOMOR: PR.08.01.6A5.6A52.10.22.024

Yth. : Koordinator Kelompok Substansi Penindakan
Dari : Kepala Balai Besar POM di Palembang
Hal : Peringatan Atas Capaian Target Rencana Aksi TW III
Tanggal : 17 Oktober 2022

Menindaklanjuti realisasi / capaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tri Wulan III (Periode Juli s/d September 2022), di mana ada indikator Ada Indikator Kinerja yang realisasi dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian/ kriteria
1.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	60,61	55,73	91,95 / Belum Memenuhi Ekspektasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya memberikan Peringatan kepada Saudara, dan selanjutnya agar melakukan pemetaan akar masalah dan upaya perbaikan dalam bentuk CAPA untuk mengejar ketertinggalan target sehingga realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Drs. Zulkifli, Apt.



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 207/BBPOMPLG/KINERJA/X/2022

Penghargaan ini diberikan kepada:

Subkelompok Program dan Evaluasi

Dalam Pencapaian Kinerja TW III Tahun 2022 Untuk IKU
" Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Palembang" sebesar 111,06 %

Palembang, 17 Oktober 2022
Kepala Balai Besar POM di Palembang,



DRS. ZULKIFLI, APT.





PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 205/BBPOMPLG/KINERJA/X/2022

Penghargaan ini diberikan kepada:

Substansi Pengujian

Dalam Pencapaian Kinerja TW III Tahun 2022 Untuk 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Palembang, 17 Oktober 2022
Kepala Balai Besar POM di Palembang,



DRS. ZULKIFLI, APT.





PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 206/BBPOMPLG/KINERJA/X/2022

Penghargaan ini diberikan kepada:

Subkelompok Inspeksi

Dalam Pencapaian Kinerja TW III Tahun 2022 Untuk 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Palembang, 17 Oktober 2022
Kepala Balai Besar POM di Palembang,



DRS. ZULKIFLI, APT.



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR OT.01.03.6A.6A52.09.22.242 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG NOMOR OT.01.03.6A.6A52.01.22.66 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN REWARD DAN PUNISHMENT PENCAPAIAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk proses pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja organisasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian penetapan Reward and Punishment Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Penetapan Reward dan Punishment Pencapaian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KIL) 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM 2020-2024;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

M E M U T U S K A N :

- Mencabut : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG NOMOR: OT.01.03.6A.6A52.01.22.66 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN REWARD DAN PUNISHMENT PENCAPAIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2022
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG NOMOR: OT.01.03.6A.6A52.09.22.242 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG NOMOR OT.01.03.6A.6A52.01.22.66 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN REWARD DAN PUNISHMENT PENCAPAIAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2022
- Kesatu : Kepala Balai Besar POM di Palembang selaku Pimpinan Unit dapat memberikan reward dan punishment terhadap pejabat eselon di bawahnya sebagai evaluasi internal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja unit.
- Kedua : Parameter pemberian reward dan punishment didasarkan kepada capaian kinerja unit berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan capaian kinerja masing- masing pejabat yang telah ditetapkan, yang dievaluasi tiap triwulan tahun anggaran dengan kriteria:
- Pemberian Reward:**
Jika Persentase capaian kinerja unit dan capaian kinerja masing-masing pejabat : $\geq 100\%$ dan $< 120\%$ (Memenuhi Ekspektasi) Pemberian Reward berupa pemberian piagam/ sertifikat.
- Pemberian Punishment:**
Jika Persentase capaian kinerja unit dan capaian kinerja masing-masing pejabat : $< 100\%$ (Belum Memenuhi Ekspektasi) dan $< 80\%$ (Tidak Memenuhi Ekspektasi) Pemberian Punishment berupa menyiapkan 3 paket hadiah untuk kegiatan quis RB.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
5. Persentase pangan portifikasi yang memenuhi syarat.
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palembang.
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang.
16. Presentase UMKM yang mmenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik.
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.
19. Jumlah desa pangan aman.
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
23. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
24. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang.
25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang.
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang.
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palembang yang optimal.
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



ZULKIFLI

